

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BANDA ACEH

NOMOR HK.02.02.1A.12.25.217 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BANDA ACEH TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Banda Aceh untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai Besar POM di Banda Aceh dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar POM di Banda Aceh.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal : 05 Desember 2025

Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh



RIYANTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman arah kebijakan, program, dan kegiatan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Aceh. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rancangan Rencana Strategis BPOM 2025-2029, dengan memperhatikan organisasi dan tata kerja BPOM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM serta arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan memperhatikan kondisi faktual di daerah.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis, Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki mandat penting dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran obat, bahan berbahaya, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan di Provinsi Aceh. Dalam lima tahun ke depan, tantangan pengawasan akan semakin kompleks seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri, penggunaan platform digital dalam distribusi produk serta kebutuhan masyarakat terhadap jaminan mutu dan keamanan produk yang semakin tinggi.

Dokumen Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan indikator kinerja utama yang dirancang



untuk menjawab tantangan tersebut. Penyusunan renstra juga memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), reformasi birokrasi, serta komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

Kami berharap Renstra 2025–2029 dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Balai Besar POM di Banda Aceh, sekaligus memastikan bahwa setiap upaya pengawasan obat dan makanan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Banda Aceh, 05 Desember 2025

Kepala Balai Besar POM di
Banda Aceh,



Riyanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Capaian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh 2020-2024.....	3
1.1.3 Struktur Organisasi	35
1.2 Potensi Dan Permasalahan	37
1.2.1 Kekuatan (Strength)	38
1.2.2 Kelemahan (Weakness).....	48
1.2.3 Peluang (<i>Opportunity</i>).....	55
1.2.4 Ancaman (<i>Threat</i>)	65
BAB II.....	74
VISI, MISI, BUDAYA ORGANISASI, TUJUAN DAN	74
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	74
2.1 Visi.....	74
2.2 Misi	76
2.3 Tujuan	79
2.4 Sasaran Kegiatan.....	80
BAB III	102
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	102
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029.....	102
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Banda Aceh ..	103
BAB IV	116
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	116
4.1 Target Kinerja	116
4.2 Kerangka Pendanaan	128
BAB V	130
PENUTUP.....	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Nilai Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024	9
Gambar 1.2 Tren Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024	10
Gambar 1.3 Tren Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024	10
Gambar 1.4 Tren Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024	11
Gambar 1.5 Tren Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024	11
Gambar 1.6 Tren Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2020-2024	12
Gambar 1.7 Tren Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan Tahun 2020-2024	13
Gambar 1.8 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024	14
Gambar 1.9 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024	15
Gambar 1.10 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM Tahun 2020-2024	15
Gambar 1.11 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2020-2024	17
Gambar 12 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2020-2024	18
Gambar 1.13 Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020-2024	18
Gambar 1.14 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020-2024	19
Gambar 1.15 Persentase Sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020-2024	19
Gambar 1.16 Indeks pelayanan publik Tahun 2020-2024	20

Gambar 1.17 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik Tahun 2022-2024	20
Gambar 1.18 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.....	21
Gambar 1.19 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020-2024	22
Gambar 1.20 Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2020-2024.....	22
Gambar 1.21 Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2020-2024.....	23
Gambar 1.22 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2020-2024	23
Gambar 1.23 Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020-2024	24
Gambar 1.24 Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020-2024.....	25
Gambar 1.25 Persentase Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2020-2024	26
Gambar 1.26 Indeks RB Tahun 2020-2024	27
Gambar 1.27 Nilai AKIP Tahun 2020-2024	27
Gambar 1.28 Nilai Pengelolaan Kearsipan.....	28
Gambar 1.29 Indeks Profesional ASN Tahun 2020-2024	29
Gambar 1.30 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal Tahun 2020-2024	30
Gambar 1.31 Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP Tahun 2020-2024	30
Gambar 1.32 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020-2024	31
Gambar 1.33 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa.....	32
Gambar 1.34 Nilai Pengelolaan BMN	32
Gambar 1.35 Persentase Realiasi PDN	33
Gambar 1.36 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	33
Gambar 1.37 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh.....	36
Gambar 1.38 Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	37
Gambar 1.39 Kebutuhan Pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh	42
Gambar 1.40 Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pegawai.....	43

Gambar 2.41 Misi Terpilih (Asta cita)	77
Gambar 2.42 Pilar Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024	4
Tabel 1.2 Matriks Ringkasan Analisis SWOT	73
Tabel 2.3 Tujuan BPOM 2025-2029	79
Tabel 2.4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	85
Tabel 2.5 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai Besar POM di Banda Aceh periode 2025-2029	88
Tabel 2.6 Muatan Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan	91
Tabel 3.7 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi	111
Tabel 4.8 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh 2025-2029.....	117
Tabel 4.9 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Banda Aceh	128
Tabel 4.10 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Banda Aceh.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Banda Aceh untuk tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan arahan dan tujuan pembangunan yang merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada periode ini, memiliki fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional dengan melindungi kesehatan masyarakat dan juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang beredar di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Banda Aceh menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;

- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Secara umum, kondisi wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh mencakup cakupan geografis yang luas, terdiri dari berbagai kabupaten/kota dengan karakteristik wilayah yang beragam, termasuk wilayah terpencil dan perbatasan. Tantangan geografis ini berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan pengawasan, distribusi informasi, serta keterjangkauan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Di sisi lain, pertumbuhan sektor UMKM pangan dan sediaan farmasi di Aceh menunjukkan tren peningkatan yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal pendampingan, edukasi, dan pengawasan berbasis risiko.

Peran Balai Besar POM di Banda Aceh sangat penting dalam melakukan pengawasan, terutama dalam pencegahan masuknya produk berbahaya yang beredar agar masyarakat dapat terjamin dan memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Upaya peningkatan pengawasan dilakukan melalui pengembangan infrastruktur dan teknologi, serta membangun jaringan pengawasan obat dan makanan secara internasional. Selain itu, pengembangan laboratorium yang modern dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengawasan obat dan makanan menjadi fokus, agar SDM dapat

berperan sebagai *human capital* yang efektif dalam meningkatkan daya saing produk obat dan makanan di Indonesia.

Dari sisi internal, Balai Besar POM di Banda Aceh telah menunjukkan kinerja positif melalui perolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta peningkatan capaian indikator pengawasan. Namun, tantangan seperti keterbatasan SDM teknis, kebutuhan sarana prasarana modern serta penguatan sinergi lintas sektor masih menjadi fokus pembenahan dalam periode Renstra ini.

Dengan memahami kondisi umum tersebut, Renstra 2025–2029 disusun untuk menjawab kebutuhan pengawasan yang lebih responsif dan partisipatif, serta untuk memastikan bahwa perlindungan masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat dapat diwujudkan secara berkelanjutan di seluruh wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh. Penyusunan Renstra 2025-2029 tetap memperhatikan perubahan lingkungan strategis serta kebutuhan pengawasan obat dan makanan di masa mendatang.

1.1.1 Capaian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh 2020-2024

Selama periode 2020-2024 Balai Besar POM di Banda Aceh telah menunjukkan kinerja yang konsisten dan adaptif dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini dapat terlihat pada realisasi dan capaian indikator kinerja yang fluktuatif dan meningkat sampai dengan periode akhir Renstra yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.80	88.37	109.37	88.00	85.66	97.34	89.0	80.38	90.31	90.00	94.85	105.39	94.9	95.69	100.83
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78.00	74.49	95.50	74.5	84.45	113.36	77.5	75.42	97.32	80.5	89.17	110.77	89.2	94.07	105.46
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85.00	88.84	104.52	88.00	86.24	98.00	89.00	80.34	90.27	90.00	94.25	104.72	94.3	93.04	98.66
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.00	42.65	60.93	50.00	68.00	136.00	51.00	84.91	166.49	52.00	89.69	172.48	89.7	89.15	99.39
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat				88.00	49.47	56.22	89.00	76.67	86.15	90.00	89.33	99.26	90.0	96.10	106.78
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	75.00	71.75	95.67	75.00	75.21	100.28	78.00	79.36	101.74	81.00	82.61	101.99	84.0	84.45	100.54

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86.00	91.32	106.19	91.1	94.10	103.29	92.3	93.5	101.30	93.4	96.14	102.93	96.2	99.49	103.42
		Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73.00	69.45	95.14	70.84	70.16	99.04	72.23	75.94	105.14	73.62	76.56	103.99	76.6	80.37	104.92
		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	85.00	69.17	81.38	95.00	94.43	99.40	96.00	91.93	95.76	93.00	97.80	105.16	98.25	98.65	100.41
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing - masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85.00	98.93	116.39	99.00	98.95	99.95	99.3	100	100.70	100	100	100	100	100	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42.5	57.06	134.26	57.00	48.71	85.46	59.00	60.00	101.69	62.00	69.27	111.73	69.3	82.91	119.64
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85.00	100	117.65	100	99.57	99.57	100	100	100	100	120	120	100	120	120
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	46.00	50.67	110.15	55.00	42.86	77.93	60.00	61.54	102.57	65.00	71.62	110.18	71.7	82.28	114.75
		Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	55.00	77.48	140.87	77.00	84.10	109.22	80.00	80.34	100.43	82.00	85.42	104.17	85.5	90.16	105.44

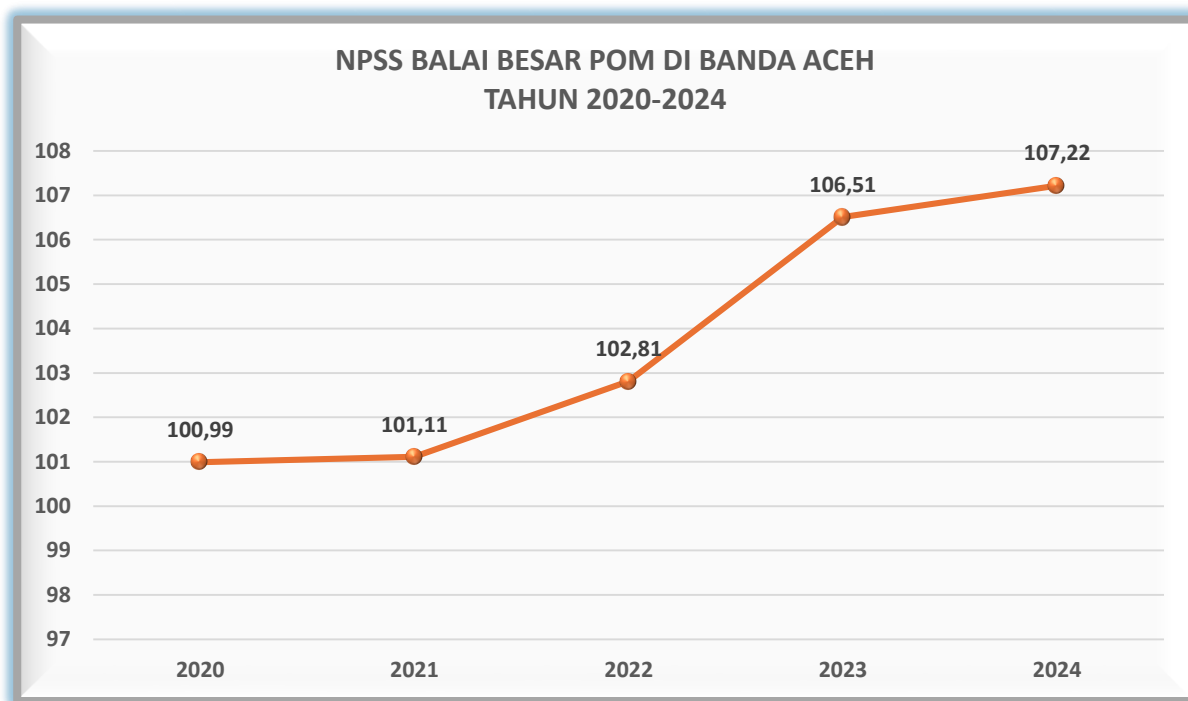
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	3.51	3.61	102.85	3.79	3.78	99.74	4.01	4.56	113.72	4.40	4.37	99.32	4.45	4.90	110.11
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik							77.00	100	129.87	79.00	100	126.58	100	100	100.00
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota													95.0	97.71	102.85
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	83.92	89.74	106.93	90.00	93.18	103.53	91.00	95.26	104.68	92.00	94.08	102.26	94.9	96.15	101.32
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16	16	100	40	40	100	56	56	100	72	72	100	88	88	100
		Jumlah desa pangan aman	5	5	100	13	13	100	19	19	100	25	25	100	32	32	100
		Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	3	3	100	9	9	100	14	14	100	19	19	100	24	24	100
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85.00	100	117.65	100	100	100	100	100	100	100	120	120	100	120	120
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83.00	100	120.48	100	100	100	100	99.70	99.70	100	120	120	100	120	120

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	82.00	64.49	78.65	84.00	109.79	130.72	77.00	85.25	110.71	80.00	85.83	107.29	82.0	100	121.95
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	90.00	76.92	85.47	79.2	79.19	99.99	80.20	87.34	108.90	81.2	86.23	106.19	88.64	87.49	98.70
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	81.00	75.91	93.72	76.90	75.96	98.78	77.90	79.16	101.62	78.9	79.48	100.74	82.4	81.48	98.88
		Nilai Pengelolaan Kearsipan													94.08	95.35	101.35
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	Indeks Profesional ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	75.00	80.94	107.92	81.00	84.44	104.25	82.00	84.68	103.27	83.00	90.13	108.59	90.52	87.14	96.27
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	80.00	73.50	91.88	74.00	77.20	104.32	79.00	80.60	102.03	84.00	85.4	101.67	87.0	87.75	100.86
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	1.51	1.70	112.58	2.00	1.65	82.5	2.25	2.88	128.00	2.5	3.00	120.0	3.00	3.00	100.00
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	93.00	89.47	96.20	90.30	88.76	98.29	90.90	88.95	97.85	92.1	89.83	97.54	89.87	95.36	106.11
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa													83.33	100	120.00
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara													89.0	91.14	102.40

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
		Persentase Realisasi Penggunaan Prdduk dalam Negeri													60.0	74.73	124.55
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95.00	100	105.26	93.00	100	107.53									

(Sumber: Laporan Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)

Dari tahun 2020-2024, nilai NPSS Balai Besar POM di Banda Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari peningkatan kinerja dari tahun 2020 sampai tahun 2024 (naik 6 poin), seperti terlihat pada gambar berikut.



Gambar 1.1 Nilai Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024

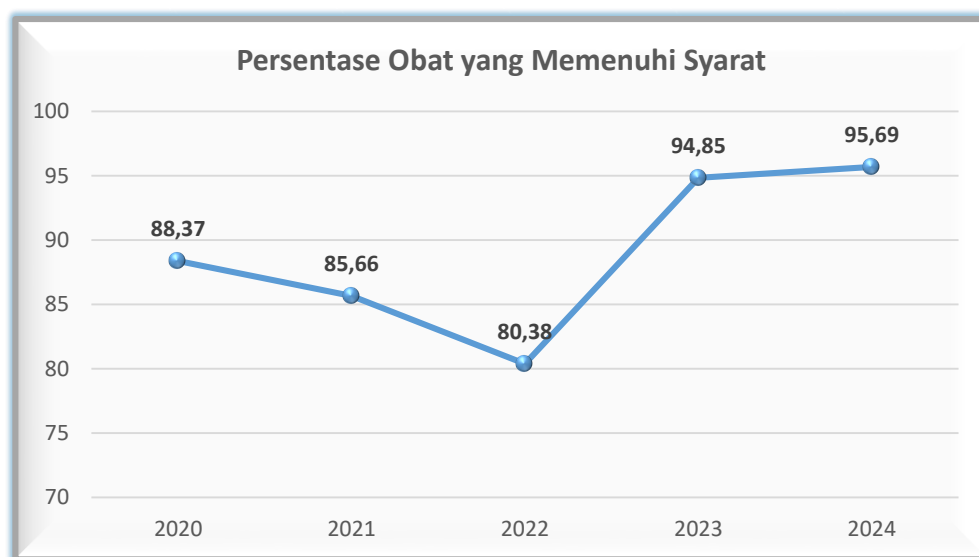
Pengukuran kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh mengacu pada Sasaran Kegiatan yang merupakan cascading dari Sasaran Strategis BPOM berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan, sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki. Pendekatan yang dilakukan menggunakan metode Balance Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki 11 Sasaran Kegiatan (SK) dan 34 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat

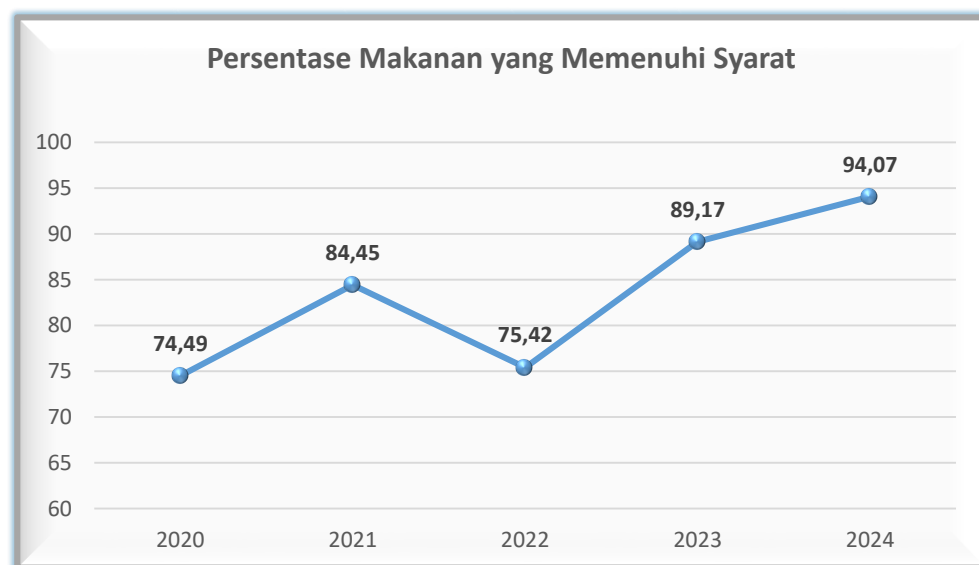
Sasaran Kegiatan ini diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat; (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat; (3) Persentase Obat yang aman dan

bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.



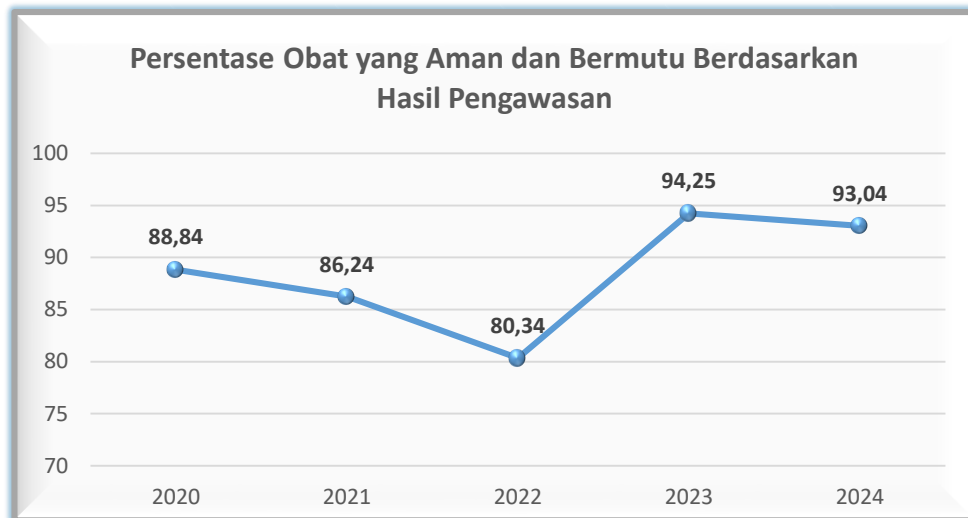
Gambar 1.2 Tren Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024

Tren realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat mengalami fluktuatif dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan hingga 95.69% dari tahun 2020 sebesar 88.37%.



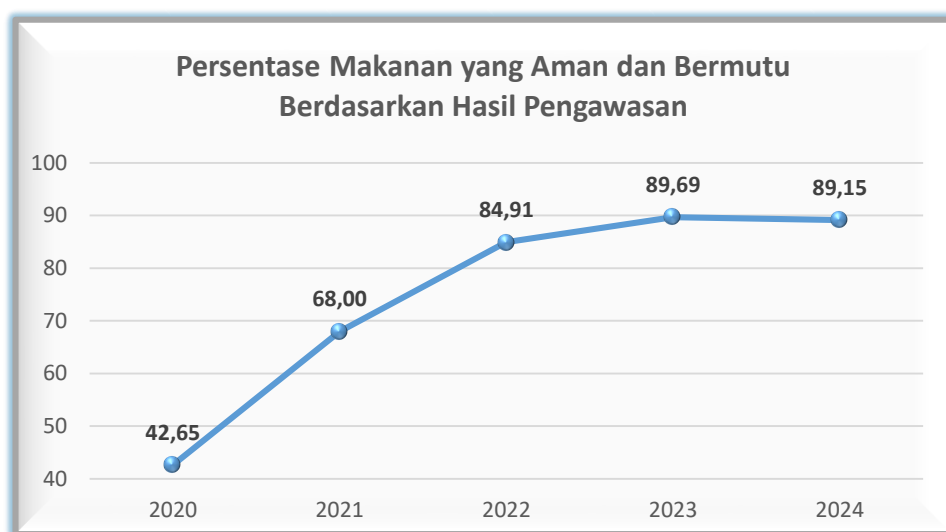
Gambar 1.3 Tren Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024

Realisasi Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 sebesar 94.07% meningkat dari tahun awal periode Renstra 2020-2024.



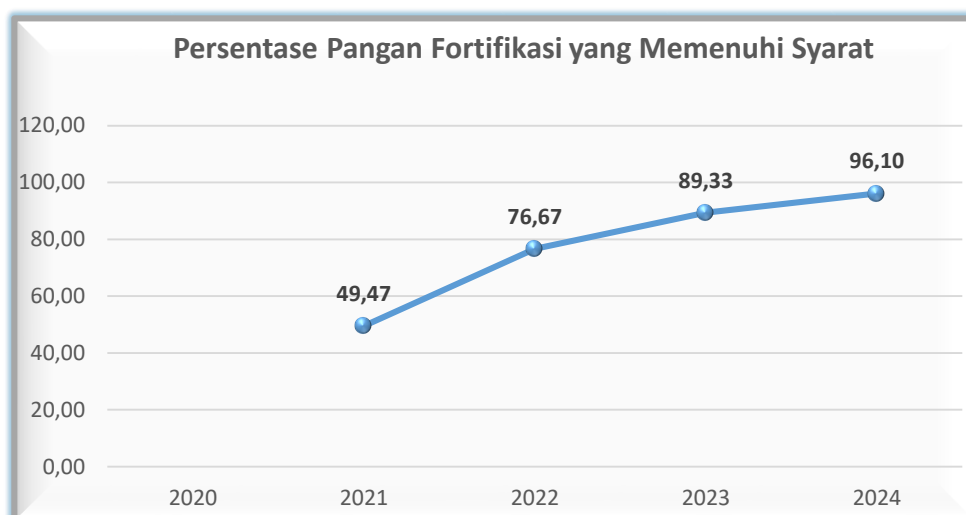
Gambar 1.4 Tren Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024

Pada Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, realisasi mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Dapat dilihat pada tahun 2022 sebesar 80.34% yang merupakan realisasi terendah selama periode renstra tersebut.



Gambar 1.5 Tren Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil Pengawasan mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 42.65% hingga 2024 menjadi 89.15%. Hal ini menggambarkan peningkatan kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh.



Gambar 1.6 Tren Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2020-2024

Indikator Persentase pangan fortifikasi baru ada pada tahun 2021, namun realisasinya mengalami peningkatan setiap tahun dan pada tahun 2024 sebesar 96.10%.

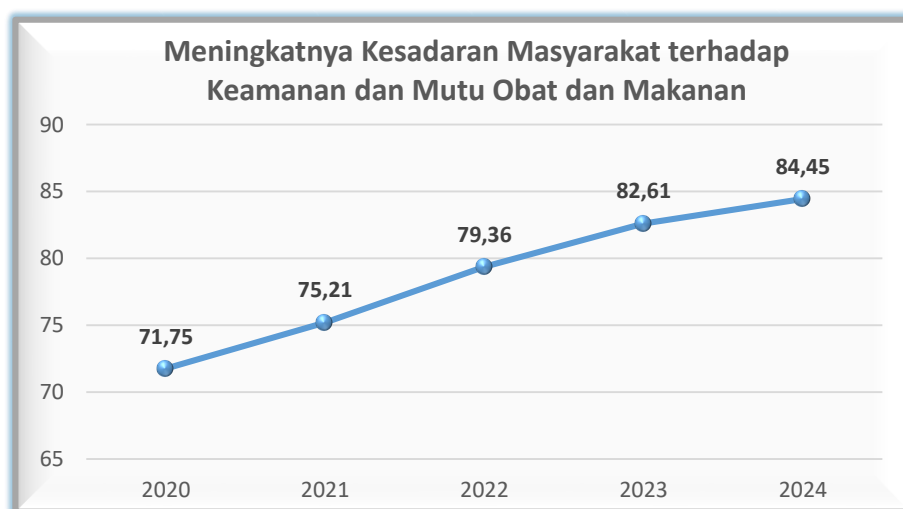
Secara umum, capaian indikator kinerja untuk Sasaran Kegiatan I di wilayah kerja menunjukkan tren yang bervariasi. Beberapa indikator mengalami peningkatan signifikan, seperti persentase makanan yang aman dan bermutu serta persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat. Namun, ada juga indikator yang mengalami penurunan pada tahun tertentu sebelum meningkat kembali, seperti persentase obat yang memenuhi syarat dan persentase obat yang aman dan bermutu. Jadi, secara umum, capaian indikator kinerja untuk Sasaran Kegiatan I mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini disebabkan karena perubahan metode sampling dan sistem regionalisasi.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan I, yaitu: a) menganalisa kendala yang terjadi pada saat

pengujian agar bias diatasi segera; b) melatih personel agar memiliki kemampuan analisa yang baik saat melakukan pengujian; c) melakukan koordinasi dengan masing-masing ketua tim di balai regional terkait timeline penyusunan sampel.

2. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan

Secara umum, capaian indikator kinerja untuk Sasaran Kegiatan II di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh menunjukkan peningkatan dan menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun.



Gambar 1.7 Tren Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

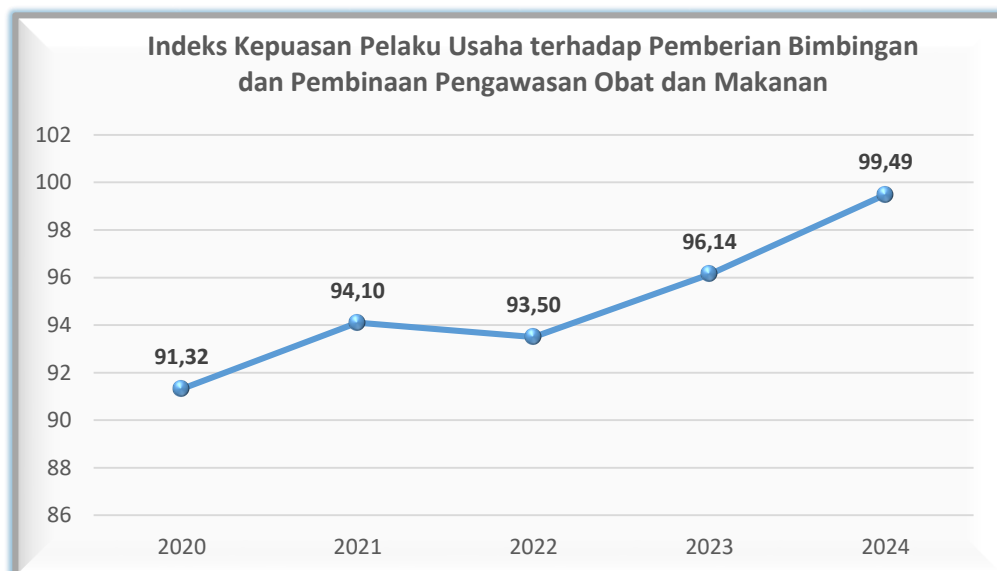
Indeks Kesadaran Masyarakat terus meningkat dari 71.75% pada tahun 2020 menjadi 82.61% pada tahun 2023 dan 84.45% di tahun 2024. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum, capaian indikator kinerja untuk Sasaran Kegiatan 2 **mengalami peningkatan**.

Namun, tetap diperlukan upaya untuk meningkatkan ataupun mempertahankan capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan II, yaitu: a) meningkatkan sinergi dengan kementerian/lembaga, terutama di daerah dengan melibatkan lintas sektor dari berbagai instansi, kader masyarakat, komunitas sekolah dan anggota SAKA POM; b) publikasi tentang Obat dan Makanan melalui media ruang seperti pembuatan poster dan banner terkait

Cek Klik dan BPOM Mobile serta Pangan Aman; c) publikasi tentang Obat dan Makanan melalui media luar ruang seperti videotron tentang Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat; d) penyebaran informasi melalui media sosial tentang keamanan jajanan berbuka ramadhan.

3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja

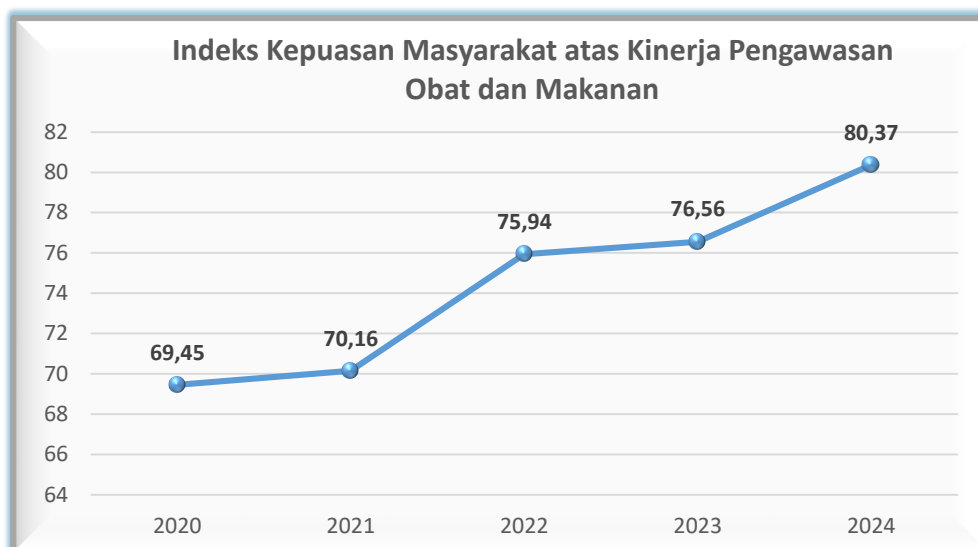
Secara umum, capaian indikator kinerja untuk Sasaran Kegiatan III di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh menunjukkan peningkatan. Meskipun ada beberapa fluktuasi, tren keseluruhan menunjukkan peningkatan kepuasan baik dari masyarakat maupun pelaku usaha.



Gambar 1.8 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

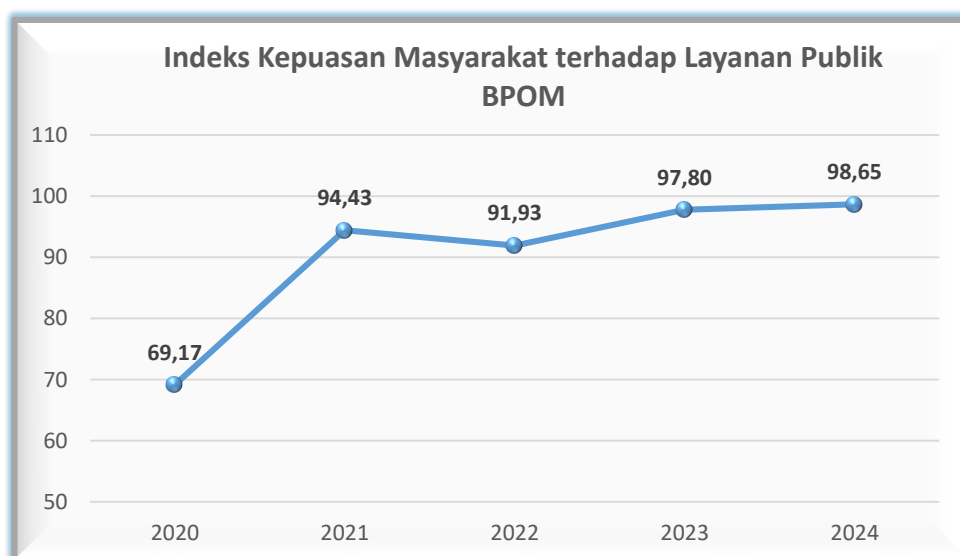
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha juga meningkat dari 91.32% pada tahun 2020 menjadi 99.49% pada tahun 2024.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Bagi UMK Pangan Olahan tahun 2024 mendapat nilai yang paling tinggi yaitu 100. Kegiatan yang dilakukan secara luring menjadi salah satu penyebab tingginya kepuasan pelaku usaha terhadap Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan karena adanya interaksi aktif antara peserta dan narasumber sehingga meningkatkan pemahaman peserta.



Gambar 1.9 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan menunjukkan peningkatan setiap tahun. Dapat dilihat pada gambar 1.8 selama periode 2020-2024, realisasi tahun 2020 sebesar 69.45% menjadi 80.37% di tahun 2024.



Gambar 1.10 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM Tahun 2020-2024

Indeks Kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM juga menunjukkan tren fluktuatif setiap tahun selama periode 2020-2024. Realisasi tahun

2020 sebesar 69.17% dan diakhir periode renstra tahun 2024 menjadi 98.65%.

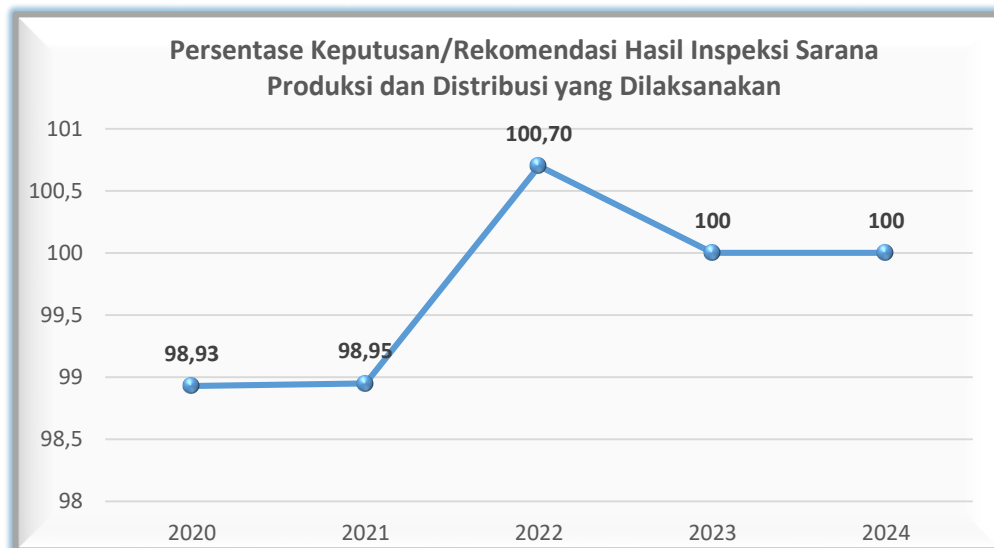
Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 3, yaitu: a) meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil survei maupun hasil pengukuran indeks; b) meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan petugas BPOM terkait pendaftaran agar proses dapat lebih cepat; c) menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan; d) menyediakan format-format dokumen terkait CPOTB, CPKB dan CPPOB agar pelaku usaha lebih mudah dalam mempersiapkan dokumen; e) meningkatkan kompetensi petugas layanan; f) melakukan update publikasi layanan pengaduan di berbagai media elektronik.

4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing - masing wilayah kerja

Secara umum, capaian indikator kinerja untuk Sasaran Kegiatan IV di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh menunjukkan peningkatan meskipun ada beberapa fluktuasi. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan beberapa indikator kinerja, sebagai berikut:

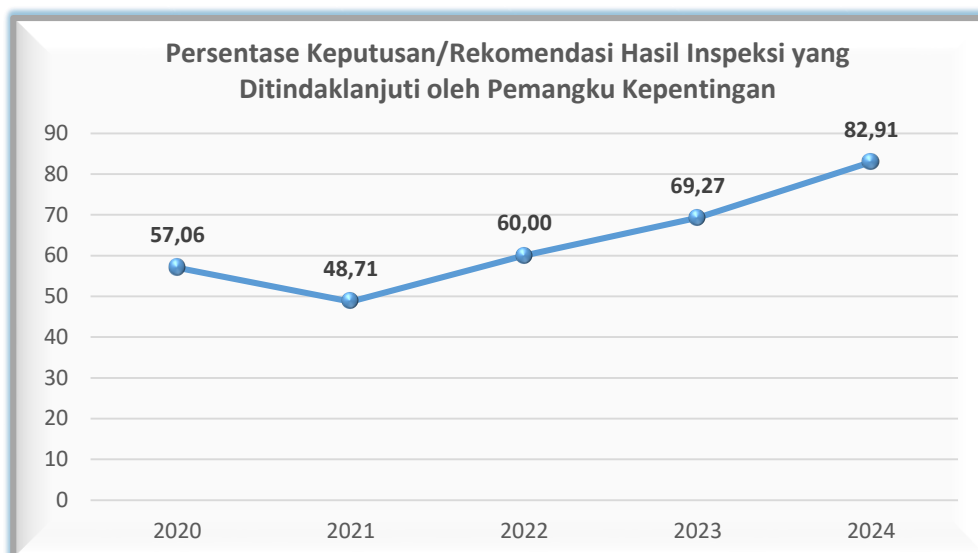
- Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi serta Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu menunjukkan hasil yang sangat tinggi dan stabil.
- Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan menunjukkan peningkatan setelah mengalami penurunan pada 2021.
- Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan menunjukkan peningkatan setelah mengalami penurunan pada 2021.

- Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan menunjukkan peningkatan setiap tahun kecuali pada 2022 yang sedikit menurun.
- Indeks Pelayanan Publik menunjukkan peningkatan yang signifikan pada 2022, meskipun sedikit menurun pada 2023 tetapi tetap berada pada tingkat yang tinggi.
- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.
- Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.



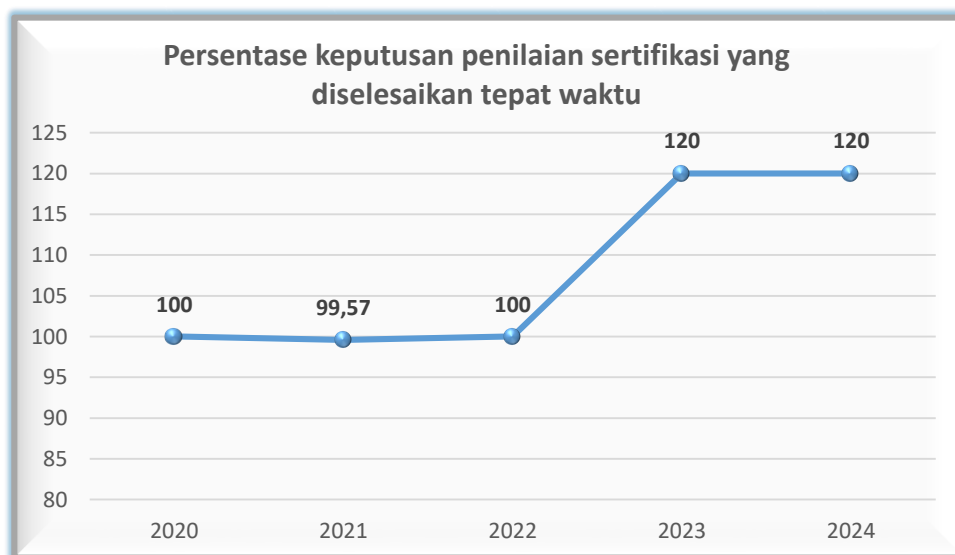
Gambar 1.11 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2020-2024

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 100.70% namun, pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 100%.



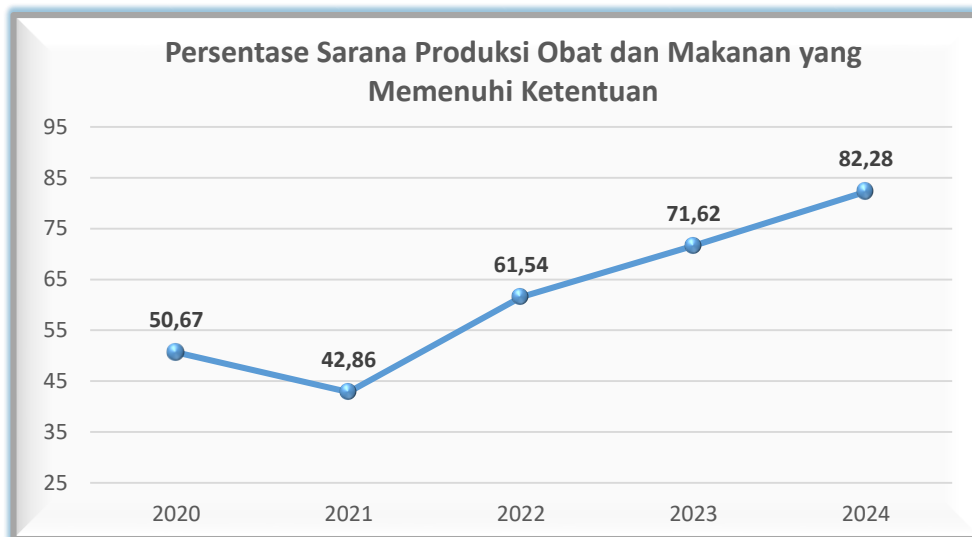
Gambar 12 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2020-2024

Pada tahun 2021 terjadi penurunan realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 48.71% namun, pada tahun 2024 meningkat menjadi 82.91%.



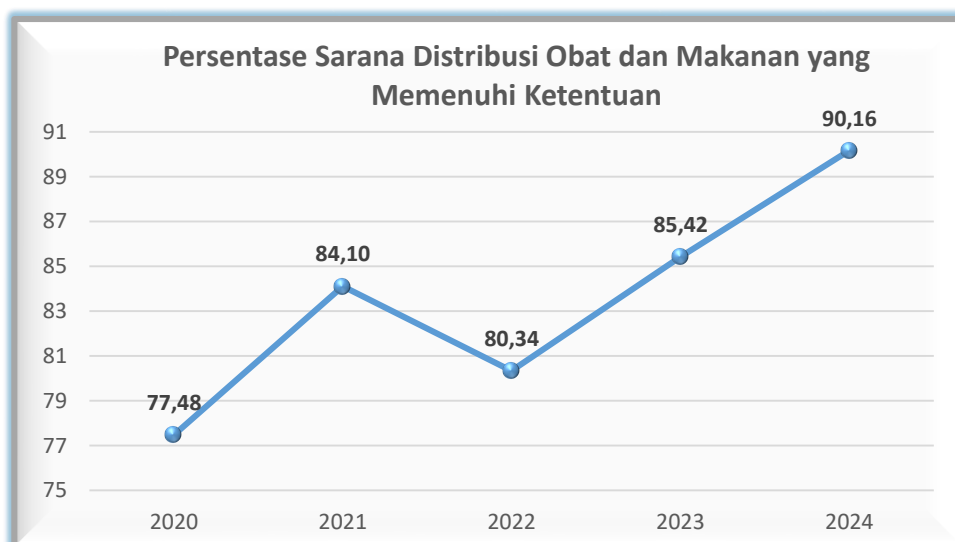
Gambar 1.13 Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020-2024

Pada tahun 2021 terjadi penurunan realisasi indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 99.57% dan meningkat pada tahun 2023 dan 2024.



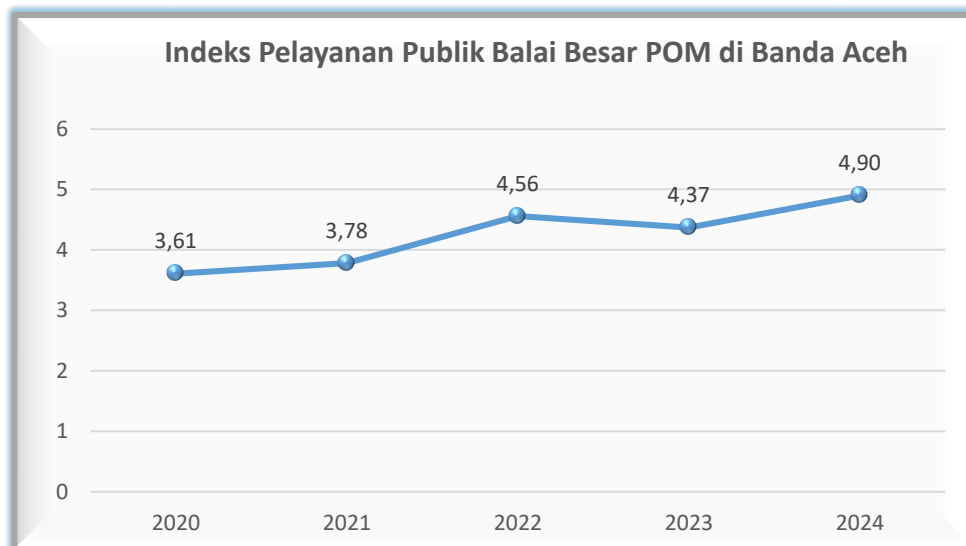
Gambar 1.14 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020-2024

Pada tahun 2021 terjadi penurunan realisasi indikator sebesar 42.86% dan meningkat pada tahun 2022 sampai 2024 sebesar 39.42 poin.



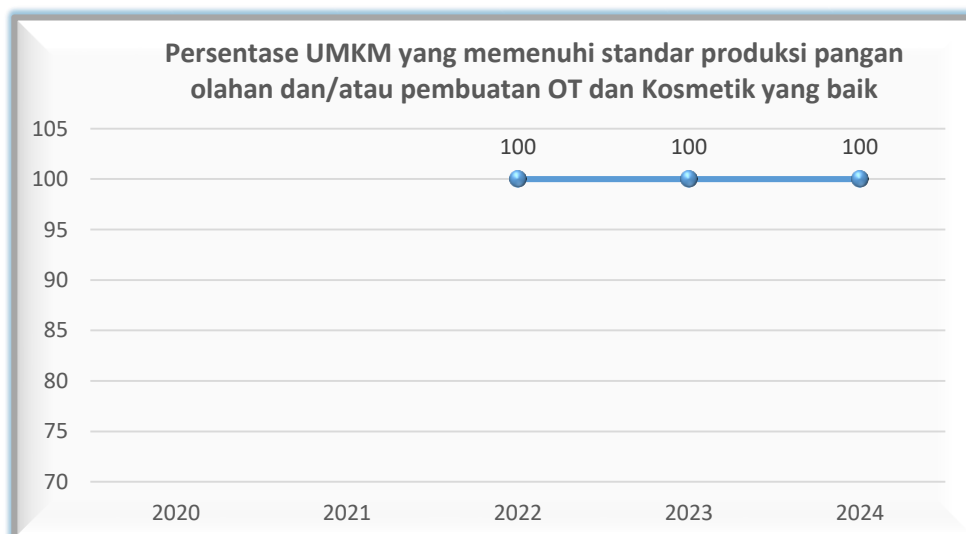
Gambar 1.15 Persentase Sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020-2024

Pada tahun 2021 realisasi indikator Persentase sarana distribusi mengalami peningkatan dan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 80.34% namun tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan.



Gambar 1.16 Indeks pelayanan publik Tahun 2020-2024

Indeks pelayanan publik mengalami peningkatan setiap tahun, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 4.37% dan meningkat di tahun 2024 menjadi 4.90%.



Gambar 1.17 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik Tahun 2022-2024

Indikator Persentase UMKM baru ada pada tahun 2022 dan setiap tahunnya memiliki realisasi yang sama sebesar 100% menandakan tercapainya target selama kurun waktu tersebut.



Gambar 1.18 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

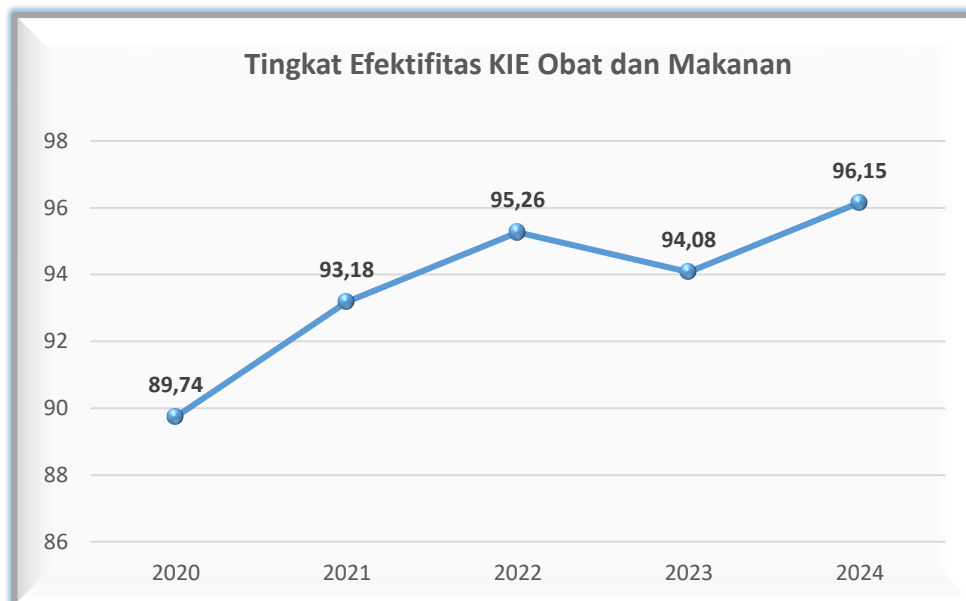
Realisasi indikator ini belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena baru ada pada tahun 2024.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 4, yaitu: a) meningkatkan koordinasi dan komunikasi aktif dengan lintas sektor; b) meningkatkan monev surat tindak lanjut yang belum direspon pelaku usaha/lintas sektor dan penyusunan sarana produksi yang diawasi; c) memperkuat sosialisasi tentang tata cara pendaftaran produk berkelanjutan; d) mengikutkan inovasi pelayanan publik dalam ajang kontes inovasi KIPP; e) melakukan pendampingan ke sarana terkait CPPOB.

Dengan demikian, dapat disimpulkan secara umum capaian indikator kinerja untuk Sasaran Kegiatan IV mengalami peningkatan.

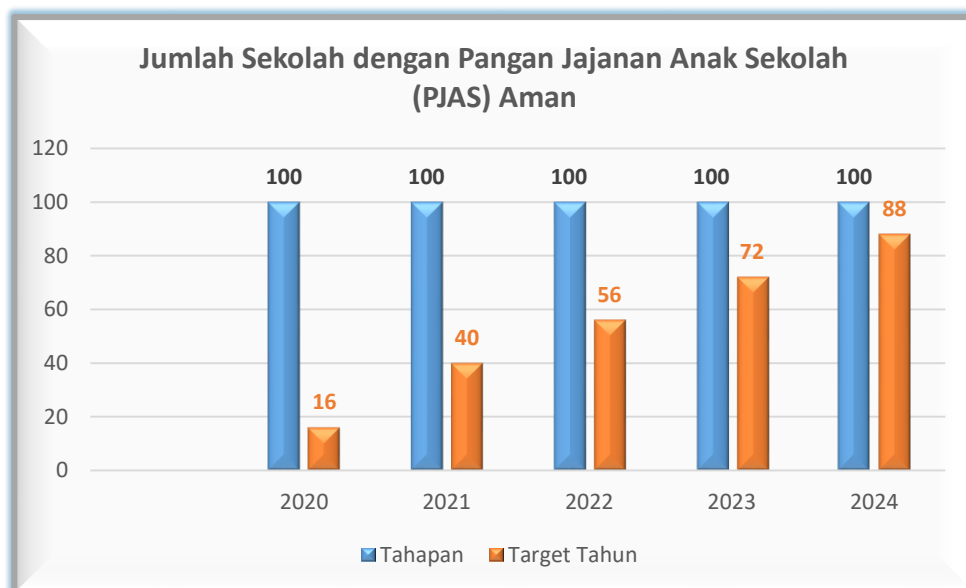
5. Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja

Secara umum, capaian indikator kinerja untuk Sasaran Kegiatan V di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh menunjukkan peningkatan yang signifikan dan konsisten setiap tahun.



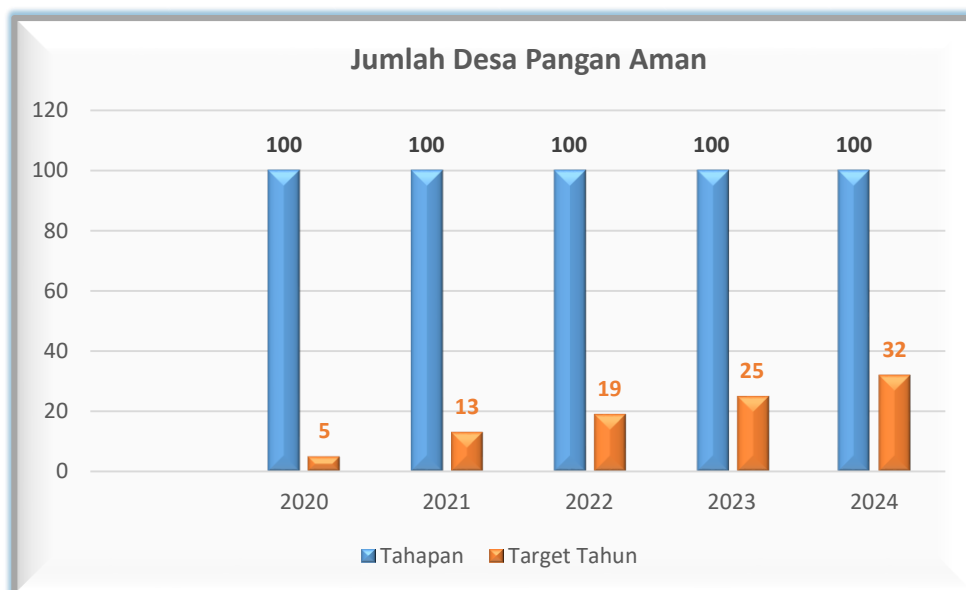
Gambar 1.19 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan meningkat dari 2020 hingga 2022, dengan sedikit penurunan pada 2023 namun tetap berada pada tingkat yang tinggi.



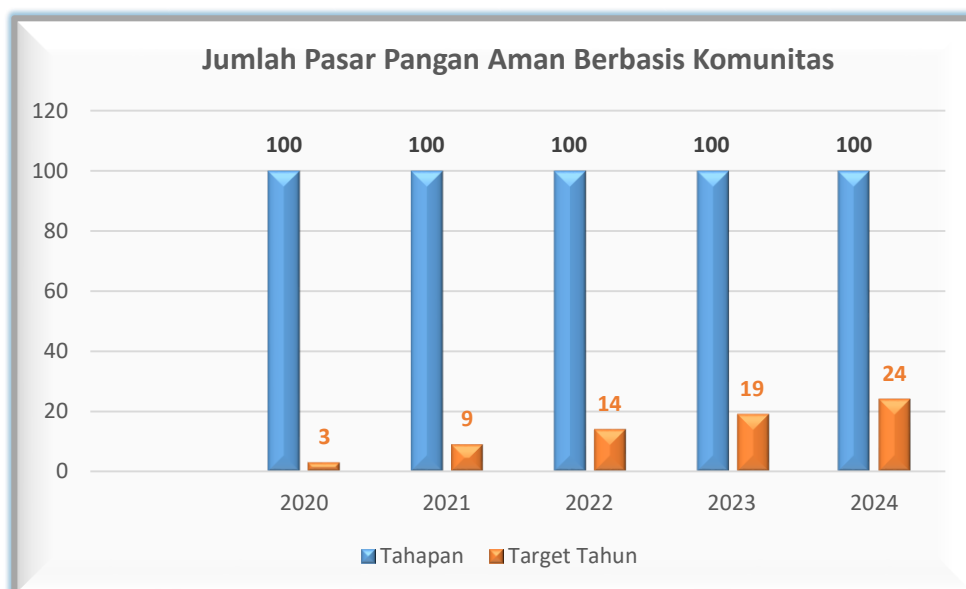
Gambar 1.20 Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2020-2024

Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman setiap tahun memenuhi standar aman dengan tercapainya setiap tahapan selama periode 2020-2024.



Gambar 1.21 Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2020-2024

Jumlah Desa Pangan Aman setiap tahun memenuhi standar aman dengan tercapainya setiap tahapan selama periode 2020-2024.



Gambar 1.22 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2020-2024

Jumlah pasar menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahun, dengan terpenuhinya semua tahapan selama periode 2020-2024.

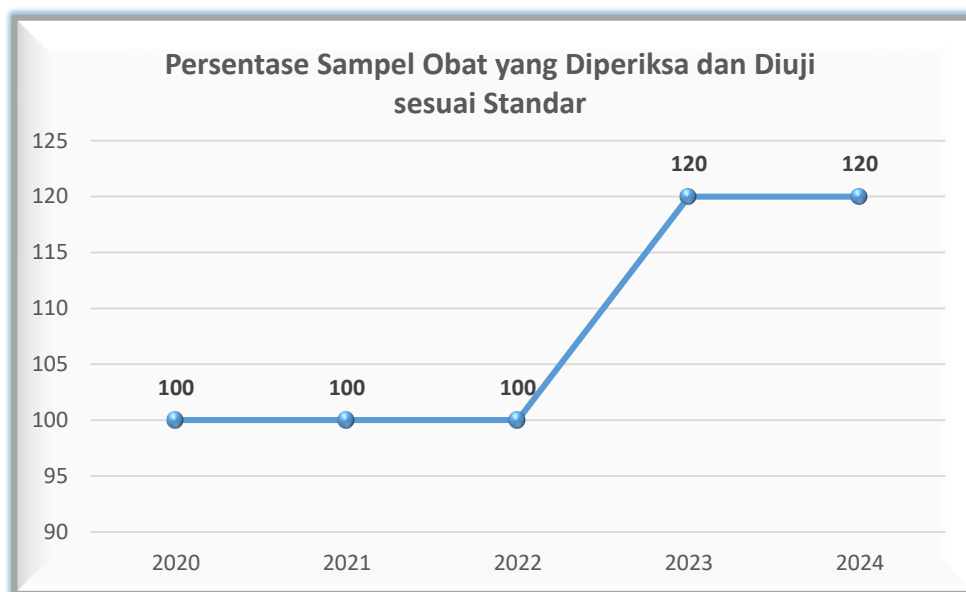
Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 5, yaitu: a) melakukan pemilihan topik KIE yang update sesuai tema orkestrasi dengan pengguna target platform; b) melibatkan

peran SAKA POM pada kegiatan KIE di area keramaian sarana ritel/warung dan membuat video konten edukasi terkait Obat dan Makanan secara menarik dan kekinian; c) memperluas program PJAS, desa dan pasar agar menjadi program prioritas pemerintah daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan secara umum capaian indikator kinerja untuk Sasaran Kegiatan V mengalami peningkatan.

6. Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja

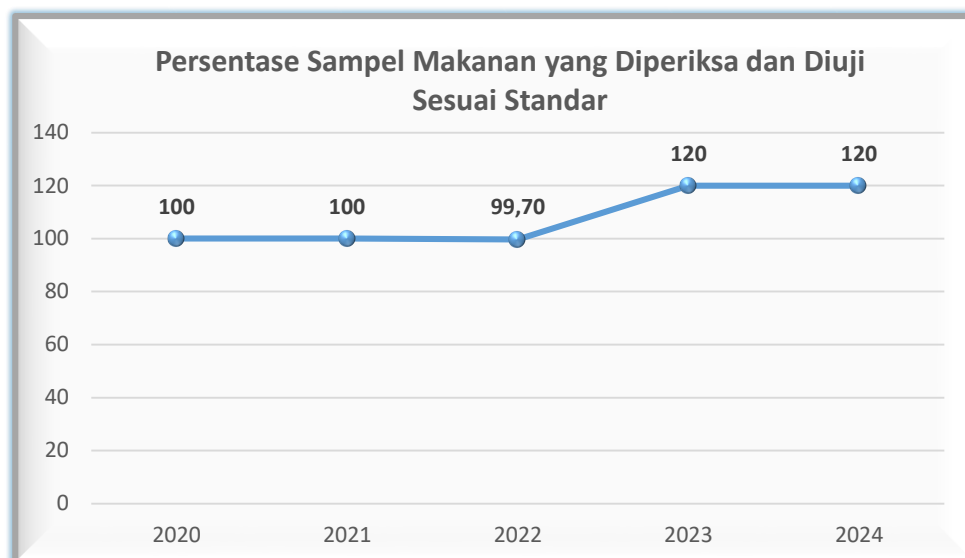
Secara umum, capaian indikator kinerja untuk Sasaran Kegiatan VI di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh menunjukkan hasil yang sangat baik dengan konsistensi yang tinggi dalam pemeriksaan dan pengujian obat dan makanan.



Gambar 1.23 Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020-2024

Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar menunjukkan konsistensi sempurna dari 2020 hingga 2024, dengan persentase sebesar 100%. Nilai 120% diperoleh dari konversi pada tahun 2023 dan 2024. Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pedoman sampling, pedoman regionalisasi dan memenuhi timeline yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena komunikasi yang baik antara petugas

sampling dan pengujian di Balai Besar POM di Banda Aceh dan laboratorium lain di wilayah regionalisasi Medan.



Gambar 1.24 Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020-2024

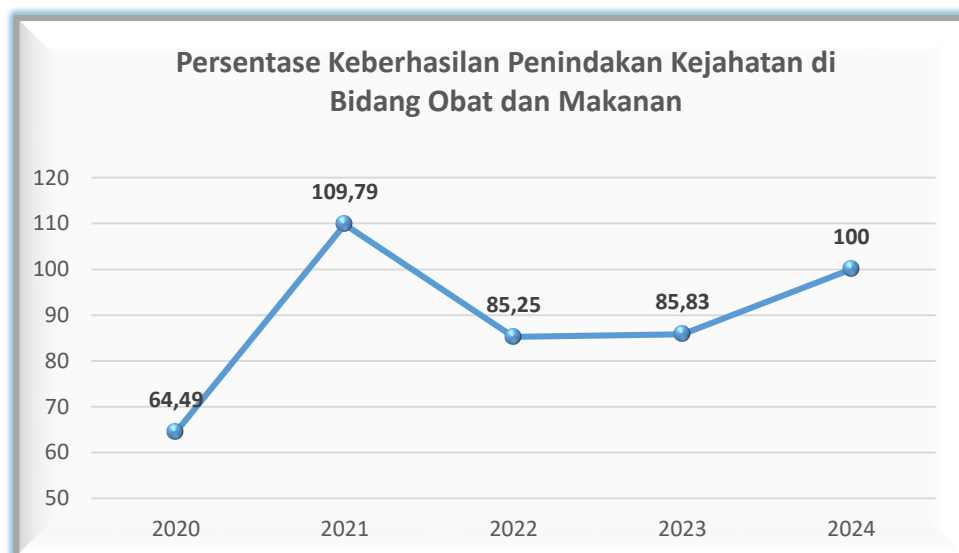
Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar memenuhi target tahun 2020 dan 2021 namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 99.70% dan meningkat lagi sampai akhir tahun periode Renstra.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 6, yaitu: a) melakukan pendampingan dan monev terkait sampel yang hampir melewati timeline; b) konsisten dalam melakukan penginputan SIPT.

Dengan demikian, dapat disimpulkan secara umum capaian indikator kinerja untuk Sasaran Kegiatan VI mengalami peningkatan yang signifikan.

7. Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja

Secara umum, capaian indikator kinerja untuk Sasaran Kegiatan VII di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh menunjukkan peningkatan, meskipun ada beberapa fluktuasi.



Gambar 1.25 Persentase Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

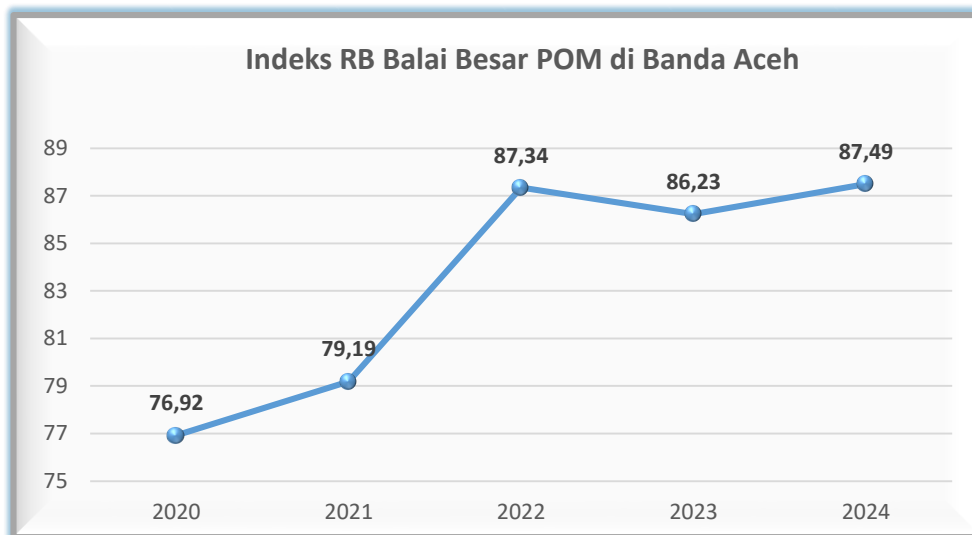
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan meningkat secara signifikan pada 2021 sebesar 109.79%, mengalami penurunan pada 2022, tetapi sedikit meningkat kembali pada 2023 dan pada tahun 2024 sudah memenuhi target menjadi 100%.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 7, yaitu: a) meningkatkan komitmen dalam pencapaian keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Dapat disimpulkan secara umum capaian indikator kinerja untuk Sasaran Kegiatan VII mengalami peningkatan.

8. Sasaran Kegiatan 8: Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal

Secara umum, capaian indikator kinerja untuk Sasaran Kegiatan VIII di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh menunjukkan peningkatan yang konsisten. Perbaikan berkelanjutan dilakukan dengan menerapkan prinsip transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam seluruh aspek layanan publik dan pengawasan obat dan makanan.

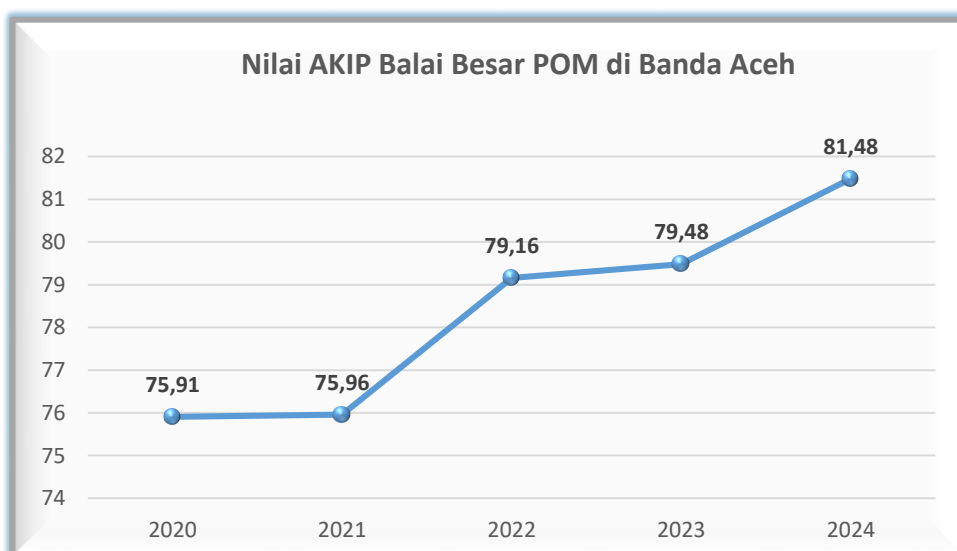
Penerapan SAKIP berjalan semakin baik, ditandai dengan perumusan perencanaan kinerja yang lebih terukur, peningkatan kualitas pelaporan, serta peningkatan nilai AKIP dari tahun ke tahun.



Gambar 1.26 Indeks RB Tahun 2020-2024

Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan peningkatan konsisten dari 2020 hingga 2022, dengan sedikit penurunan pada 2023. Meskipun pada tahun 2023 mengalami penurunan, Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari KemenPAN RB pada tahun tersebut.

Peningkatan pada tahun 2024 menunjukkan konsistensi Balai Besar POM di Banda Aceh dalam melakukan pembangunan ZI untuk mempertahankan WBK dan berusaha untuk meraih predikat WBBM pada tahun berikutnya.



Gambar 1.27 Nilai AKIP Tahun 2020-2024

Selama periode tahun 2020–2024, Balai Besar POM di Banda Aceh menunjukkan peningkatan signifikan dalam capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan keberhasilan meraih predikat A pada tahun 2024 dan realisasi sebesar 81.48%. Peningkatan ini merupakan hasil dari komitmen kuat seluruh jajaran dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.



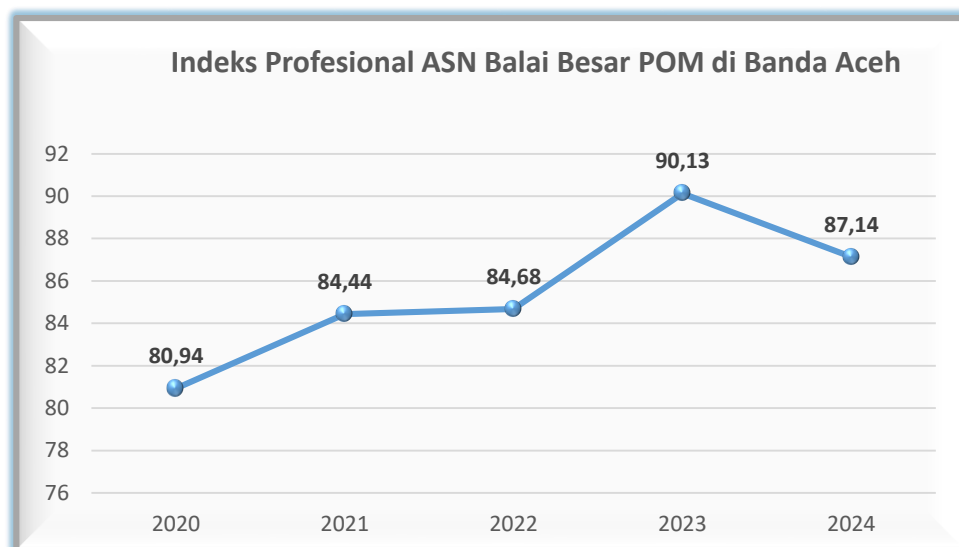
Gambar 1.28 Nilai Pengelolaan Kearsipan

Nilai Pengelolaan kearsipan baru menjadi Indikator Kinerja Utama ada pada tahun 2024 dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 8, yaitu: a) konsisten dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan inovasi; b) meningkatkan komitmen dalam penginputan di RHPK setiap bulan; c) melakukan update data secara rutin pada kearsipan.

9. Sasaran Kegiatan 9: Terwujudnya SDM Aceh yang berkinerja optimal

Secara umum, capaian indikator kinerja untuk pada sasaran ini menunjukkan hasil yang positif.



Gambar 1.29 Indeks Profesional ASN Tahun 2020-2024

Indeks Profesional ASN terus meningkat setiap tahun, mencerminkan peningkatan profesionalisme ASN di Balai Besar POM di Banda Aceh. Pada tahun 2023, indeks ini mencapai nilai 90.52 meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020 dan mengalami penurunan di tahun 2024 dikarenakan ada perubahan standar penilaian oleh BKN.

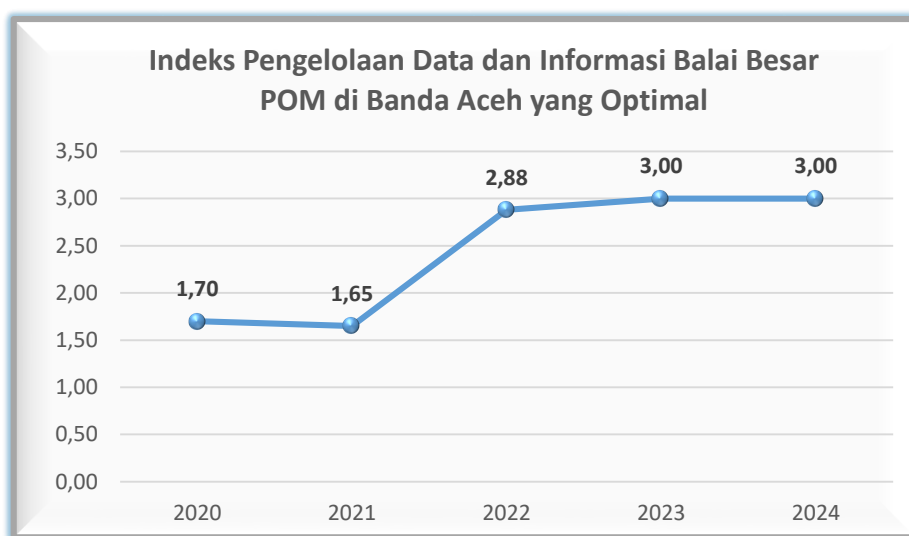
Namun, tetap perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pencapaian Sasaran Kegiatan 9 yaitu: a) meningkatkan kompetensi pegawai; b) memenuhi standar kualifikasi pendidikan minimal S1; c) melakukan monev setiap bulan.

10. Sasaran Kegiatan 10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Secara umum, capaian indikator kinerja untuk Sasaran kegiatan ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Peningkatan kapasitas laboratorium dilakukan melalui modernisasi peralatan, optimalisasi metode uji, serta peningkatan kompetensi analis sehingga pengujian menjadi lebih akurat, cepat, dan dapat diandalkan dalam mendukung penindakan maupun pembinaan pelaku usaha.

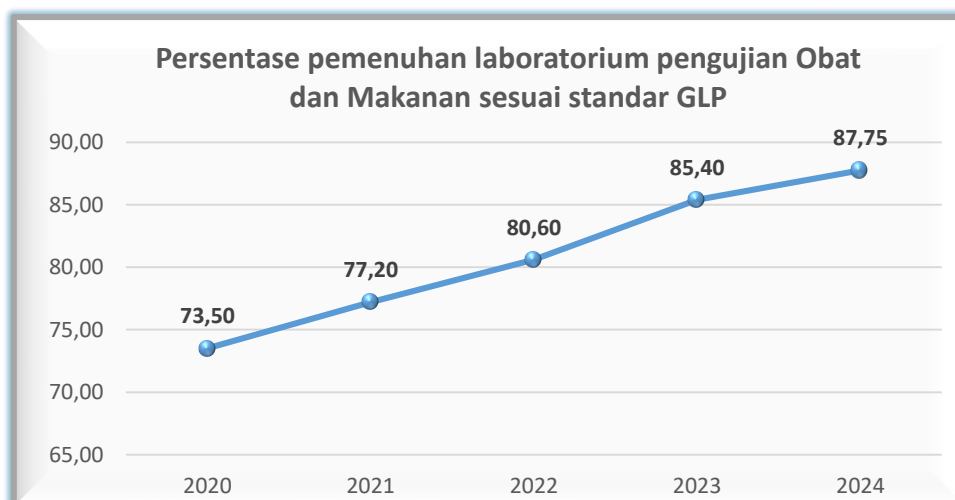
Pada indeks pengelolaan data dan informasi salah satu risiko utama yang berhasil diidentifikasi yaitu sering terjadinya gangguan server atau

jaringan eror. Risiko ini berhasil dikendalikan secara baik dengan penambahan kapasitas jaringan dan memperbaharui sarana/prasarana IT. Sebagai tambahan, tim IT juga aktif melakukan pengawasan penggunaan perangkat lunak terkait keaslian dan umur pakai dan selalu mengedukasi pegawai untuk melakukan pelaporan berbasis aplikasi dengan memperhatikan ketepatan waktu pelaporan.



Gambar 1.30 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal Tahun 2020-2024

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi mencatat peningkatan signifikan, dari 112,58% pada tahun 2020 hingga mencapai 120,00% pada tahun 2024, yang menunjukkan pengelolaan data dan informasi semakin optimal.



Gambar 1.31 Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP Tahun 2020-2024

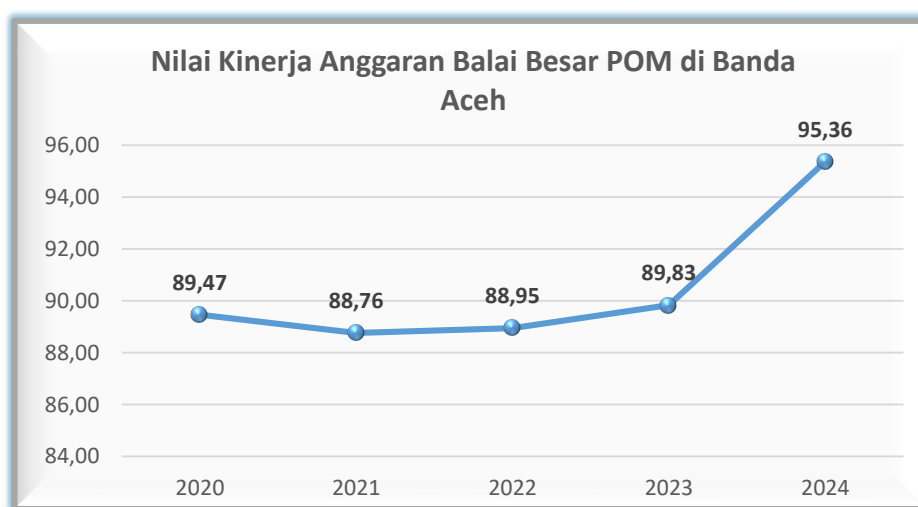
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar GLP menunjukkan peningkatan setiap tahun, dari 73.50% pada tahun 2020 menjadi 87.75% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan penguatan laboratorium dalam memenuhi standar internasional.

Sasaran Kegiatan 10 telah berhasil menunjukkan penguatan yang nyata dalam pengelolaan laboratorium serta data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan. Hasil ini mengindikasikan keberhasilan dalam upaya mendukung pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

Namun, tetap perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan pencapaian Sasaran Kegiatan 10, yaitu: a) melakukan perencanaan yang baik terhadap kebutuhan reagensia, suku cadang, dan baku pembanding untuk mengantisipasi kekurangan dan kehabisan reagensia untuk pengujian rutin maupun pengujian regional; b) peningkatan kompetensi SDM sesuai rencana; c) konsisten dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap indeks pemutakhiran data dan informasi.

11. Sasaran Kegiatan 11: Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel

Anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Sasaran ini diukur menggunakan 5 (lima) indikator yaitu:



Gambar 1.32 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020-2024

Nilai Kinerja Anggaran tidak memenuhi target dari tahun 2020-2023. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan terlalu tinggi dan terdapat 2 komponen penilaian yang berlawanan. Dimana jika penyerapan anggaran tinggi maka nilai IKPA akan tinggi, sedangkan bila penyerapan anggaran tinggi nilai efisiensi pada EKA pasti rendah. Oleh karena itu, tahun 2024 dilakukan review target untuk nilai NKA yang disesuaikan dari realisasi pada triwulan III tahun 2023 dan pada tahun 2024 terjadi peningkatan NKA menjadi 95.36%.



Gambar 1.33 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa baru ada pada tahun 2024 dan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 1.34 Nilai Pengelolaan BMN

Nilai pengelolaan Barang Milik Negara baru ada pada tahun 2024 dan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 1.35 Persentase Realiasi PDN

Persentase realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri baru ada pada tahun 2024 dan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 1.36 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT menunjukkan pencapaian yang konsisten, dengan tingkat efisiensi yang melampaui target setiap

tahun. Pada tahun 2021 dan 2022 tingkat efisiensi mencapai 100% mencerminkan pengelolaan anggaran yang optimal. Indikator kinerja ini hanya ada di tahun 2020 dan 2021.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian Sasaran Kegiatan 11 yaitu, a) penyusunan Laporan Keuangan Unaudited dan Audited; b) meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran; c) tindak lanjut rekomendasi LHP BPK secara tepat waktu; d) perencanaan yang baik terhadap pengadaan produk dalam negeri.

1.1.2 Aspirasi Stakeholder

Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai perwakilan BPOM di Provinsi Aceh memahami pentingnya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi. Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, dapat dikembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang emergent, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Aspirasi stakeholder juga membantu dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting dalam menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif.

Terkait hal ini, aspirasi stakeholder menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh dalam menyusun

perencanaan program pengawasan. Diperlukan feedback dari stakeholder agar Balai Besar POM di Banda Aceh dapat terus meningkatkan pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi Aceh.

Berdasarkan hasil klasterisasi saran dan analisis diatas feedback dan saran dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan stakeholder dalam peningkatan kinerja.

1. Balai Besar POM di Banda Aceh diharapkan dapat memperluas jangkauan pengawasan hingga ke daerah terpencil atau wilayah dengan keterbatasan akses informasi.
2. Balai Besar POM di Banda Aceh diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan frekuensi pengawasan terhadap pelaku usaha, khususnya dalam memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, mutu dan label produk.
3. Balai Besar POM di Banda Aceh dapat menindaklanjuti hasil temuan agar tercipta akuntabilitas dan kepercayaan publik.
4. Balai Besar POM di Banda Aceh dapat meningkatkan sinergi antar instansi serta peningkatan komunikasi dengan masyarakat untuk mendukung efektivitas pengawasan.

1.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan secara optimal di wilayah kerjanya. Struktur ini dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, serta mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Gambar 1.37 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh

Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional.

Penataan dan penguatan UPT BPOM dilakukan melalui penyusunan kriteria klasifikasi organisasi UPT BPOM yang digunakan sebagai instrumen penilaian untuk melakukan penataan tugas, fungsi, klasifikasi, jumlah, susunan organisasi, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT di lingkungan BPOM, termasuk pembentukan UPT BPOM di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan organisasi.

Balai Besar POM di Banda Aceh termasuk salah satu UPT Badan POM RI dengan cakupan wilayah pengawasan sebanyak 13 Kabupaten/Kota,

dengan 9 Kabupaten dan 4 Kota, yang meliputi Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireun, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Kota Sabang.



Gambar 1.38 Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

1.2 Potensi Dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai Besar POM di Banda Aceh dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi. Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dalam mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Rencana Strategis 2025-2029. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan.

Pada awal tahun 2025, Balai Besar POM di Banda Aceh juga berperan aktif mendukung implementasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengawasan keamanan, mutu, dan gizi pangan yang didistribusikan kepada masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan. Dukungan tersebut diwujudkan dengan memastikan produk pangan yang digunakan dalam program MBG memenuhi standar keamanan pangan, bebas dari bahan berbahaya, serta memiliki kandungan gizi sesuai ketentuan. Selain itu, Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) kepada pihak penyelenggara, produsen, dan masyarakat agar semakin sadar pentingnya pangan yang aman, bergizi, dan bermutu. Dengan kontribusi ini, maka Balai Besar POM di Banda Aceh turut menjamin keberlanjutan program MBG dalam meningkatkan kualitas kesehatan, ketahanan gizi, dan daya saing generasi muda di masa depan.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Balai Besar POM di Banda Aceh menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, digunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh dalam merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

1.2.1 Kekuatan (Strength)

Dalam menganalisis kondisi internal suatu organisasi diperlukan rancangan strategi yang efektif. Dengan memanfaatkan kekuatan internal suatu organisasi dapat menghadapi tantangan eksternal dan menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

1. Komitmen kepemimpinan yang kuat

Komitmen dalam kepemimpinan merupakan fondasi penting dalam mencapai tujuan strategis. Hal ini mencakup kemampuan kepemimpinan untuk mengarahkan, menggerakkan, dan memastikan seluruh sumber daya organisasi digunakan secara efektif untuk mendukung pengawasan

obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Kepemimpinan yang berorientasi pada visi, didukung dengan kemampuan tata kelola dan inovasi, menjadi kunci keberhasilan Balai Besar POM di Banda Aceh dalam melindungi masyarakat dan mendukung pembangunan kesehatan di wilayah Aceh.

Selain itu, kepemimpinan Balai Besar POM di Banda Aceh turut berperan besar dalam **percepatan transformasi digital** dan penguatan **budaya integritas layanan publik**. Melalui arahan pimpinan, berbagai inovasi digital dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kemudahan akses layanan masyarakat. Salah satu wujud nyata adalah hadirnya **Aplikasi “Klinik POMA”**, yang tidak hanya mempercepat proses pelayanan tetapi juga telah direplikasi di tingkat nasional sebagai bukti keberhasilan transformasi digital yang berdampak luas.

Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Banda Aceh berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Pencapaian predikat ini menunjukkan komitmen dalam menerapkan Reformasi Birokrasi secara konsisten, dengan fokus pada peningkatan integritas, transparansi, dan kualitas layanan publik. Keberhasilan ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Beberapa penghargaan yang diperoleh sebagai bukti komitmen untuk terus berkembang, sebagai berikut:

- a. Predikat terbaik ke-1 (satu) Kategori Implementasi KKP Terbaik Periode Semester I Tahun 2023 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh.
- b. Predikat terbaik ke-2 (dua) Kategori Implementasi KKP Terbaik Periode Semester II Tahun 2023 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh.
- c. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) pada Bulan Desember Tahun 2023.
- d. Apresiasi atas Inovasi Aplikasi “Klinik POMA” dari Badan POM bahwa Inovasi Direplikasi di Tingkat Nasional.

- e. Penghargaan “Si Paling Orkestrasi” Tahun 2023 dari Badan POM dengan kategori Balai Besar POM.
- f. Penghargaan dengan Kategori “The Most Engaging Instagram Account” dari Badan POM dalam rangka HUT BPOM Tahun 2024.
- g. Penghargaan atas partisipasi menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Tahun 2024 dari PJ Walikota Banda Aceh.
- h. Penghargaan sebagai Satker Mitra Kerja KPPN dengan Capaian IKPA “Sangat Baik” Triwulan II tahun 2024 dari Kementerian Keuangan.
- i. Penghargaan dari Atsiri Research Center (ARC) Tahun 2024 merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Balai Besar POM di Banda Aceh dalam pengembangan industri nilam di Aceh.

Kepemimpinan yang berintegritas juga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel. Setelah meraih predikat **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** pada tahun 2023, kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh menunjukkan peningkatan yang signifikan. **Nilai SAKIP meningkat dari 79,16 pada tahun 2022 menjadi 81,48 pada tahun 2024**, mencerminkan efektivitas tata kelola dan pencapaian hasil yang semakin optimal.

2. Kerjasama lintas sektor dan jaringan kerjasama yang solid

Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, akademisi dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini memastikan pengawasan produk obat dan makanan dilakukan secara komprehensif melalui bantuan dari berbagai pihak, mendukung program prioritas nasional (seperti penurunan angka stunting, edukasi keamanan pangan, dan pengendalian produk ilegal), mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan terkait keamanan obat dan makanan serta memanfaatkan teknologi maupun tenaga ahli.

Kolaborasi ini diwujudkan dalam berbagai bentuk nyata, antara lain:

- a) **Kolaborasi dengan akademisi** dari berbagai universitas di Aceh seperti **Universitas Syiah Kuala (USK), UIN Ar-Raniry, Universitas Samudra (UNSAM), Universitas Teuku Umar (UTU), Universitas Muhammadiyah**

Aceh (UNMUHA), Universitas Ubudiyah, dan beberapa perguruan tinggi lainnya dalam kegiatan penelitian, edukasi, dan pengembangan inovasi terkait pengawasan obat dan makanan.

- b) **Kolaborasi dengan berbagai media**, baik **media cetak, elektronik, maupun digital**, untuk memperluas jangkauan informasi publik terkait keamanan obat dan makanan serta mendukung kampanye edukatif bagi masyarakat.
- c) **Kolaborasi dengan organisasi profesi dan masyarakat**, seperti **Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Asperindo, GP Farmasi, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Pramuka, IWAPI, DWP, PKK, Persit, serta komunitas penyandang disabilitas**, dalam kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan masyarakat.
- d) **Kolaborasi bersama pelaku usaha dan dunia bisnis**, termasuk **perbankan, GP Farmasi, Atsiri Research Center (ARC)**, serta pelaksanaan **program orang tua angkat** untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keamanan produk lokal.
- e) **Kolaborasi lintas sektor bersama instansi pemerintah dan instansi vertikal**, seperti **Kejaksaan, Polri, BNN, Bea Cukai, BKKBN, BGN, TNI, Pemerintah Aceh, serta Pemerintah Kabupaten/Kota beserta OPD terkait**, guna memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran produk ilegal serta mendukung sinergi kebijakan kesehatan masyarakat.
- f) **Kolaborasi program prioritas nasional bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag)**, termasuk dengan **Kabupaten Bireuen dan Pidie Jaya dalam kegiatan Replikasi Pasar Pangan Aman**, sebagai upaya memastikan keamanan pangan di tingkat pasar rakyat serta pemberdayaan pedagang dan konsumen melalui edukasi dan pembinaan terpadu.

3. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM

Pengalaman dan kompetensi teknis sumber daya manusia (SDM) Balai Besar POM di Banda Aceh merupakan salah satu kekuatan (strength) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan obat dan

makanan di wilayah kerja. Peran ini sangat strategis dalam memastikan bahwa setiap kegiatan pengawasan dilakukan secara akurat, profesional, dan sesuai standar nasional maupun internasional.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas. Hal ini untuk memastikan bahwa Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki tenaga kerja yang kompeten, memadai, dan mampu menjalankan fungsi pengawasan, pelayanan publik, dan edukasi secara efektif. Pemenuhan SDM tidak hanya mencakup kuantitas, tetapi juga kualitas tenaga kerja yang diperlukan untuk menghadapi tantangan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Dengan SDM yang terampil, Balai Besar POM di Banda Aceh dapat lebih responsif terhadap tantangan baru, termasuk inovasi produk dan ancaman keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.



Gambar 1.39 Kebutuhan Pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh

(Sumber: SIASN BPOM per 01 Oktober 2025)

Berdasarkan data kepegawaian per 01 Oktober 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh saat ini adalah 88 orang yang terdiri atas, 71 PNS dan 17 PPPK. Sebanyak 57 orang menduduki jabatan fungsional Farmasi dan Makanan (PFM), 15 orang jabatan fungsional tertentu lainnya dan 14 orang pelaksana. Dengan mempertimbangkan wilayah pengawasan, diperlukan upaya penambahan SDM dan peningkatan kompetensi pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh.

Pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki pengalaman dalam melakukan inspeksi, pengujian laboratorium, edukasi publik, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan sediaan farmasi dan pangan olahan. Mereka terlibat langsung dalam proses pre-market maupun post-market, termasuk pengawasan terhadap produk-produk ilegal, berisiko tinggi, atau yang belum memiliki izin edar. Pengalaman ini membentuk ketangguhan kelembagaan dalam merespons

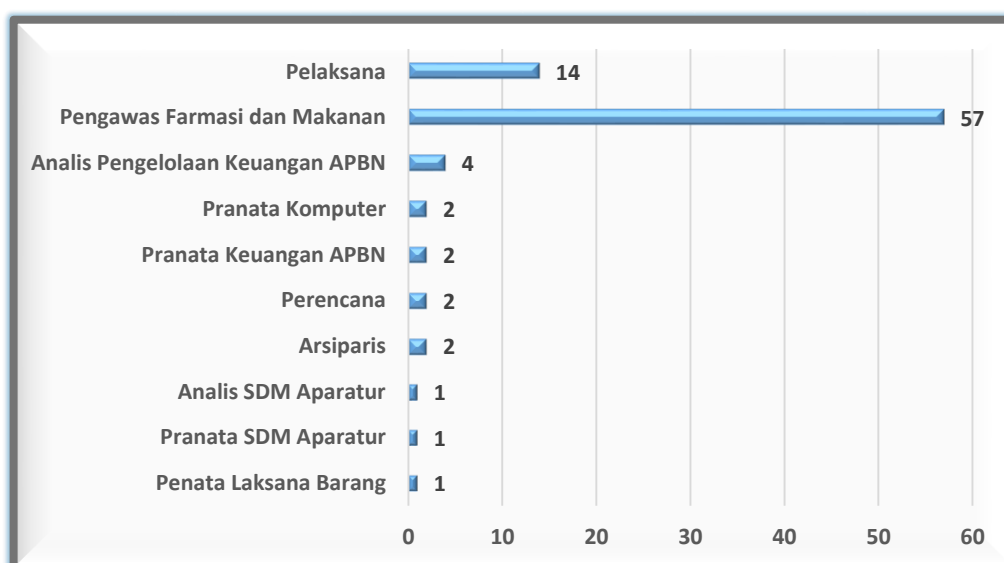
berbagai tantangan di lapangan, termasuk meningkatnya kompleksitas produk dan dinamika distribusi, terutama di era digital.

Selain pengalaman, pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh juga memiliki kompetensi teknis yang mumpuni, dibuktikan dengan kemampuan mereka dalam mengoperasikan alat-alat laboratorium yang berstandar. Kemampuan ini memungkinkan pengujian terhadap berbagai parameter keamanan dan mutu produk secara ilmiah dan valid. Banyak di antara mereka juga memiliki sertifikasi kompetensi, serta terus mengikuti pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.

Kemampuan SDM mampu memberikan pendampingan teknis kepada pelaku usaha, khususnya UMKM pangan dan farmasi, dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar mutu.

Dengan demikian, pengalaman dan kompetensi teknis SDM Balai Besar POM di Banda Aceh tidak hanya menjadi kekuatan internal, tetapi juga merupakan keberhasilan organisasi dalam menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat, serta mendorong terciptanya sistem pengawasan yang adaptif dan berkelanjutan.

Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki 6 (enam) jabatan fungsional dengan kompetensi teknis dan keahlian spesifik tertentu. Sebanyak 80 persen pegawai merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan 20 persen merupakan jabatan fungsional lainnya.



Gambar 1.40 Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh

Kompetensi teknis dan spesialisasi jabatan yang dimiliki tidak hanya berperan dalam aspek pengawasan, tetapi juga dalam pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan terkini dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Balai Besar POM di Banda Aceh juga memiliki sumber daya manusia dengan kualifikasi profesional yang kuat. **Sebanyak 26 orang pegawai telah memiliki sertifikat profesi sebagai Apoteker**, yang menjadi bukti kompetensi dan keahlian mereka dalam bidang kefarmasian. Keberadaan tenaga profesional ini memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan, terutama dalam aspek pengujian, inspeksi, serta penilaian mutu dan keamanan produk obat dan makanan.

Apoteker di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh berperan strategis dalam memberikan pertimbangan teknis, melakukan kajian risiko, serta memastikan penerapan standar nasional dan internasional dalam setiap kegiatan pengawasan. Kompetensi profesi ini menjadi fondasi penting dalam menjaga kredibilitas hasil pengawasan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan.

4. Kemampuan laboratorium pengujian yang terakreditasi

Laboratorium Balai Besar POM di Banda Aceh dilengkapi dengan peralatan yang mampu mendeteksi berbagai jenis bahan aktif, bahan tambahan, dan kontaminan berbahaya pada produk. Teknologi seperti HPLC (High-Performance Liquid Chromatography), GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry), dan PCR (Polymerase Chain Reaction) memungkinkan analisis yang akurat, cepat, dan sesuai dengan standar internasional. Penggunaan teknologi ini memastikan kemampuan pengujian yang relevan untuk menghadapi perkembangan jenis produk yang semakin kompleks.

Kehandalan laboratorium juga ditunjang oleh standar operasional yang sesuai dengan akreditasi internasional, seperti ISO/IEC 17025, yang menjamin validitas dan keakuratan hasil pengujian. Laboratorium ini mampu menangani berbagai jenis pengujian, termasuk analisis kimia untuk mendeteksi bahan aktif dalam obat, mikrobiologi untuk memastikan

keamanan pangan dari kontaminasi patogen, dan toksikologi untuk mengevaluasi potensi bahaya produk.

Selain kemampuan teknis, laboratorium didukung oleh tenaga ahli yang berkompeten dan terus mengembangkan keahlian mereka melalui pelatihan rutin. Hal ini memastikan bahwa proses pengujian selalu mengikuti metode terbaru dan standar terbaik yang tersedia.

Selain mendukung kegiatan rutin pengawasan, **Laboratorium Balai Besar POM di Banda Aceh juga berkontribusi signifikan terhadap efisiensi dan percepatan layanan pengujian**, terutama dalam situasi **Kejadian Luar Biasa (KLB)**, pengawasan produk **ekspor**, serta pendampingan **UMKM pangan dan obat tradisional**. Melalui optimalisasi peralatan dan sistem kerja berbasis risiko, waktu penyelesaian pengujian dapat dipersingkat hingga lebih efisien, sehingga hasil laboratorium dapat segera dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan cepat dan tepat oleh pemangku kepentingan terkait.

Laboratorium ini juga terus bertransformasi menuju konsep **green laboratory** dengan penerapan prinsip ramah lingkungan, seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah kimia yang berkelanjutan, serta penggunaan bahan pengujian yang lebih aman dan minim dampak terhadap lingkungan.

Selain itu, Balai Besar POM di Banda Aceh sedang mengembangkan **transformasi digital pengujian** melalui integrasi sistem informasi laboratorium yang memungkinkan **otomatisasi proses pencatatan, pelaporan hasil, dan pelacakan sampel secara realtime**. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan akurasi dan transparansi, tetapi juga memperkuat kecepatan pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan.

5. Pemanfaatan teknologi dan inovasi

Dalam mendukung pengawasan obat dan makanan, Balai Besar POM di Banda Aceh menggunakan sistem informasi terkait pelaporan obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Dengan mengembangkan aplikasi berbasis teknologi (aplikasi mobile), masyarakat dapat dengan mudah mengecek produk yang terdaftar ataupun memiliki izin edar yang sah.

Dalam hal pengujian juga memanfaatkan peralatan laboratorium yang canggih dan berbasis teknologi untuk memastikan hasil pengujian yang akurat dan cepat. Teknologi ini memungkinkan pengujian yang lebih efisien terhadap sampel produk, sehingga proses pengawasan menjadi lebih cepat dan tepat.

Sebagai upaya memperkuat sistem pengawasan berbasis data, Balai Besar POM di Banda Aceh juga mengembangkan dan mengimplementasikan **strategi pengembangan BPOMShare serta e-Surveillance System** sebagai bagian dari integrasi data nasional. Melalui sistem ini, data hasil pengawasan dari berbagai wilayah dapat terhubung secara real-time, memungkinkan analisis tren pelanggaran, pemetaan risiko, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan terukur. Integrasi ini menjadi langkah strategis dalam mendukung kebijakan pengawasan yang berbasis bukti (*evidence-based monitoring*) dan memperkuat kolaborasi lintas unit di lingkungan Badan POM.

Selain itu, Balai Besar POM di Banda Aceh juga mendorong **inovasi layanan publik berbasis masyarakat**, salah satunya melalui pengembangan **“Korporasi”**. Platform ini berfungsi sebagai **kanal layanan konsultasi dan edukasi daring** bagi masyarakat dan pelaku usaha, yang menyediakan informasi terkait keamanan obat dan makanan, bimbingan perizinan, serta wadah pelaporan produk bermasalah. Inovasi ini tidak hanya memperluas jangkauan pelayanan, tetapi juga meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pengawasan obat dan makanan yang transparan, cepat, dan mudah diakses. Bahkan sudah ada inovasi terbaru yakni **“ATM BPOM”** yang mempermudah proses pelayanan jarak jauh yang memudahkan menjangkau masyarakat serta dapat efisiensi anggaran.

6. Program edukasi dan pemberdayaan terstruktur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih dan mengonsumsi obat dan makanan yang aman serta memahami regulasi yang mengatur produk-produk tersebut.

Program ini dirancang dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, agar dapat memberikan dampak yang maksimal.

Dalam program ini dilakukan kegiatan pelatihan/workshop, sosialisasi dan kampanye publik, pemberdayaan komunitas, penyuluhan di sekolah/lembaga pendidikan dan kolaborasi dengan instansi terkait.

Melalui program ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan peduli terhadap keselamatan produk obat dan makanan yang mereka konsumsi, serta memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kualitas dan keamanan produk di pasar.

Pelaksanaan program edukasi ini juga difokuskan pada **pendekatan berbasis data risiko**, dengan memprioritaskan **wilayah desa rawan pangan dan daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi**. Pendekatan ini memastikan kegiatan edukasi dan pendampingan dilakukan secara tepat sasaran, sehingga pesan tentang pentingnya keamanan obat dan makanan dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Melalui pemetaan risiko tersebut, Balai Besar POM di Banda Aceh dapat mengarahkan sumber daya dan materi edukasi yang lebih relevan dengan kondisi lokal serta mendorong perubahan perilaku konsumsi yang lebih sehat dan aman.

Sebagai bagian dari strategi jangka menengah, program ini juga menargetkan **peningkatan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha** dalam memenuhi standar keamanan dan mutu produk. Upaya ini dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan, asistensi teknis, serta monitoring kepatuhan regulasi di sektor pangan dan farmasi. Dengan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha, diharapkan rantai produksi dan distribusi obat serta makanan menjadi lebih tertib, aman, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

7. Penyempurnaan proses bisnis yang berkelanjutan

Penyempurnaan proses bisnis dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dalam setiap aspek operasional secara terus-menerus. Dalam hal ini, Balai Besar POM di Banda Aceh telah memiliki sistem manajemen mutu dan tersedianya prosedur kerja yang

terstandar QMS dan SMAP serta menerapkan implementasi SAKIP dan SPIP untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan.

Penyempurnaan proses bisnis tersebut telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi. Hal ini tercermin dari terus dilakukannya proses penentuan risiko yang menggambarkan seluruh risiko yang ada di Balai Besar POM di Banda Aceh yang jumlahnya mencapai 133 Risiko pada tahun 2024, termasuk risiko korupsi yang dapat digambarkan dengan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi yang meningkat per Agustus 2025 yakni nilai Sempurna 4.00 menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan secara efektif dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, penerapan prosedur kerja terstandar dan pemanfaatan teknologi digital dalam alur kerja (*digital workflow*) juga berhasil meningkatkan **efisiensi waktu penyelesaian proses hingga lebih dari 20%** dibandingkan periode sebelumnya.

1.2.2 Kelemahan (Weakness)

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Banda Aceh mengidentifikasi dan memahami kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Berikut ini merupakan kelemahan yang perlu diperhatikan:

1. Keterbatasan dan distribusi Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan dan distribusi sumber daya manusia (SDM) pada Balai Besar POM di Banda Aceh merujuk pada situasi di mana jumlah, kompetensi, atau penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya seimbang dengan kebutuhan operasional di lapangan. Kondisi ini terlihat dari beban kerja yang tinggi pada kegiatan seperti pengawasan lapangan, pengujian laboratorium, penyuluhan masyarakat, dan pembinaan pelaku usaha, terutama di wilayah luar pusat kota besar, daerah terpencil, dan wilayah perbatasan. Ketidakseimbangan antara jumlah pegawai dan beban tugas dapat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kecepatan layanan publik.

Untuk memastikan perencanaan kebutuhan SDM yang lebih tepat sasaran, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan Analisis Beban Kerja (ABK) secara berkala. Hasil ABK digunakan untuk memetakan kebutuhan pegawai berdasarkan volume, kompleksitas, dan sebaran kegiatan, sehingga penempatan personel dapat dilakukan secara proporsional dan berbasis data. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat mengidentifikasi area kerja yang membutuhkan tambahan tenaga fungsional tertentu, seperti pengawas farmasi dan makanan, analisis laboratorium, maupun tenaga penyuluh serta menyusun strategi peningkatan kapasitas pegawai agar mampu menyesuaikan dengan tuntutan tugas yang dinamis.

Pelaksanaan ABK juga menjadi dasar dalam pengusulan formasi pegawai baru, redistribusi SDM lintas bidang, serta pengembangan kompetensi berkelanjutan. Dengan demikian, Balai Besar POM di Banda Aceh dapat menjaga keseimbangan antara jumlah dan kompetensi pegawai dengan beban kerja riil, mendukung efektivitas pengawasan obat dan makanan secara menyeluruh di seluruh wilayah Aceh.

2. Adanya gap kompetensi pegawai

Gap kompetensi pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh merujuk pada kesenjangan antara tingkat keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai dengan yang seharusnya dimiliki untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Kesenjangan ini dapat berdampak pada efektivitas pengawasan obat dan makanan serta kualitas pelayanan publik. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, perbedaan pengalaman dan keahlian antar pegawai, serta meningkatnya kompleksitas tuntutan pekerjaan seiring dengan perkembangan teknologi dan regulasi.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, dilakukan berbagai strategi seperti pelatihan dan sertifikasi secara berkala, mentoring, kolaborasi antarpegawai, serta evaluasi kinerja yang rutin dan berbasis kompetensi. Kesenjangan pada kompetensi manajerial dan sosiokultural menjadi perhatian khusus karena aspek ini terkait dengan soft competency yang

memerlukan waktu, perubahan perilaku, dan pendekatan pembinaan jangka panjang melalui mentoring dan coaching. Sementara itu, kompetensi teknis terus diasah melalui penugasan lapangan, pelatihan teknis, serta pendidikan formal sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.

Sebagai langkah strategis, Balai Besar POM di Banda Aceh tengah menyusun Learning Roadmap yang mencakup tiga dimensi utama kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural untuk memastikan pengembangan SDM berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Roadmap ini akan menjadi panduan dalam penentuan jenis pelatihan, prioritas peningkatan kapasitas, serta penempatan pegawai berdasarkan kebutuhan kompetensi organisasi.

Selain itu, penguatan kapasitas juga akan dilaksanakan melalui program mentoring lintas UPT (Unit Pelaksana Teknis) agar terjadi transfer pengetahuan dan praktik terbaik antar Balai POM di seluruh Indonesia. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu memperkecil kesenjangan kompetensi, meningkatkan profesionalisme pegawai, dan mendorong terciptanya sumber daya manusia yang adaptif, berintegritas, dan unggul dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.

3. Keterbatasan wewenang penegakan hukum

Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki tugas utama dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di masyarakat untuk memastikan keamanan, mutu, dan kelayakan konsumsi. Namun, secara kewenangan, Balai Besar POM di Banda Aceh tidak memiliki otoritas langsung dalam penegakan hukum pidana, melainkan berperan pada aspek **penegakan hukum administratif**, seperti pemberian sanksi berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin edar, atau penarikan produk dari peredaran. Kondisi ini menyebabkan proses penindakan hukum terhadap pelanggaran berat sering kali memerlukan waktu lebih lama dan efek jera bagi pelaku belum

maksimal, sehingga masih berpotensi terjadinya pengulangan tindak pidana.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Balai Besar POM di Banda Aceh memperkuat mekanisme koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Bea Cukai. Kerja sama ini diwujudkan melalui pembentukan tim koordinasi terpadu dan kegiatan joint operation dalam rangka penindakan pelanggaran distribusi obat dan makanan ilegal di wilayah Aceh.

Sebagai langkah strategis, Balai Besar POM di Banda Aceh juga tengah menginisiasi Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kepolisian Daerah Aceh guna mempercepat proses tindak lanjut hasil pengawasan yang memiliki indikasi pelanggaran hukum pidana. Melalui mekanisme ini, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan berkesinambungan antara tahap pengawasan, penyidikan, hingga penuntutan.

Selain memperkuat aspek koordinasi penegakan hukum, Balai Besar POM di Banda Aceh juga berupaya meningkatkan edukasi dan sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta akademisi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Pendekatan preventif ini diharapkan mampu mengurangi pelanggaran di hulu dan mendorong terbentuknya budaya kepatuhan serta tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan obat dan makanan di wilayah Aceh.

4. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki

Data merupakan aset strategis yang dapat membantu dalam memahami pola, tren, dan risiko yang terkait dengan obat dan makanan, namun hingga saat ini potensi tersebut tampak belum digali secara mendalam. Kegagalan dalam memanfaatkan data yang ada bisa mengakibatkan keputusan yang diambil kurang optimal.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan, Balai Besar POM di Banda Aceh mengembangkan dashboard

pengawasan berbasis risiko yang mengintegrasikan berbagai sumber data, meliputi hasil pengujian laboratorium, laporan inspeksi, serta aduan masyarakat. Melalui sistem ini, setiap informasi akan diolah secara analitis untuk memetakan tingkat risiko produk, pelaku usaha, dan wilayah pengawasan sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terarah.

Selain itu, penguatan peran unit perencanaan juga menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi menuju *evidence-based policy*, yakni kebijakan yang disusun berdasarkan hasil analisis data dan bukti empiris. Pendekatan ini memungkinkan setiap langkah strategis, seperti penentuan prioritas pengawasan atau penyusunan program pembinaan pelaku usaha, dilakukan secara objektif dan terukur.

Dengan sinergi antara sistem data terintegrasi dan kapasitas analisis perencanaan yang kuat, Balai Besar POM di Banda Aceh diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan serta mendorong terciptanya tata kelola data yang transparan dan adaptif terhadap tantangan di lapangan.

5. Biaya pengujian yang tinggi menjadi hambatan kepatuhan UMKM terhadap kewajiban registrasi produk

Balai Besar POM di Banda Aceh memberikan berbagai bentuk dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memastikan produk yang dihasilkan aman, berkualitas, dan sesuai dengan regulasi. Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik maupun internasional.

Namun, masih terdapat kendala dalam mendukung pertumbuhan UMKM salah satunya mahal biaya pengujian yang memberatkan pelaku UMKM dengan modal terbatas, sehingga tidak ingin mendaftarkan produknya. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang enggan mengurus legalitas produknya, sehingga produk mereka tetap berada di pasar informal atau tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

Untuk mengatasi mahalanya biaya pengujian dapat dilakukan kolaborasi antara instansi pemerintah dan pihak swasta untuk mewujudkan solusi yang berkelanjutan dan inklusif bagi UMKM.

Sebagai langkah strategis untuk mengatasi kendala biaya pengujian yang masih menjadi beban bagi pelaku UMKM, Balai Besar POM di Banda Aceh mengembangkan skema subsidi biaya uji melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan pelaku industri besar dalam bentuk program *lab sharing* atau dukungan dana bersama. Skema ini diharapkan mampu menekan biaya sertifikasi dan pengujian produk, sehingga semakin banyak UMKM yang terdorong untuk memenuhi standar keamanan dan mutu pangan maupun obat tradisional sesuai regulasi yang berlaku.

Selain itu, dukungan Balai Besar POM di Banda Aceh juga difokuskan pada pendampingan berbasis klaster komoditas lokal, seperti nilam, kopi, dan produk herbal khas Aceh, yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan daya saing ekspor. Pendampingan dilakukan melalui pelatihan teknis, asistensi pemenuhan regulasi, serta bimbingan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).

Melalui strategi kolaboratif ini, Balai Besar POM di Banda Aceh tidak hanya membantu pelaku usaha meningkatkan mutu produknya, tetapi juga memperkuat ekosistem industri lokal yang aman, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah yang inklusif.

6. Keterbatasan Luas Prasarana Gedung

Untuk mendukung kinerja pengujian dan pengawasan produk yang efektif dibutuhkan alat laboratorium yang lebih banyak dan canggih, yang memungkinkan pengujian dapat dilakukan lebih cepat dan lebih banyak produk yang diuji. Namun, jika kapasitas gedung tidak diperbaharui atau diperluas, ruang untuk menampung alat-alat baru menjadi terbatas.

Saat ini, kondisi gedung laboratorium Balai Besar POM di Banda Aceh sudah penuh dan tidak bisa dikembangkan untuk peralatan baru. Hal ini

juga terkait dengan luas area perkantoran yang terbatas sehingga sulit untuk mengembangkan kantor.

Sebagai langkah antisipatif terhadap keterbatasan kapasitas gedung yang ada, Balai Besar POM di Banda Aceh telah menyusun masterplan pengembangan fasilitas jangka menengah dengan fokus utama pada pembangunan laboratorium baru yang lebih modern, efisien, dan berwawasan lingkungan. Masterplan ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan penambahan peralatan berteknologi tinggi serta peningkatan volume pengujian seiring dengan kompleksitas produk yang diawasi.

Selain itu, Balai Besar POM di Banda Aceh juga mengusulkan integrasi rencana pembangunan fasilitas tersebut ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan POM Pusat, sehingga kebutuhan pengembangan infrastruktur dapat tersinkronisasi dengan arah kebijakan nasional serta dukungan penganggaran yang berkelanjutan.

Melalui perencanaan yang terarah ini, diharapkan pengembangan sarana laboratorium dan perkantoran dapat memperkuat kapasitas kelembagaan, mempercepat layanan pengujian, dan mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan obat dan makanan secara optimal di wilayah Aceh.

7. Sistem TI belum terintegrasi secara optimal

Sistem teknologi informasi (TI) Balai Besar POM di Banda Aceh saat ini belum terintegrasi secara optimal. Kondisi sistem TI yang terpisah-pisah antar fungsi menciptakan hambatan dalam aliran informasi, memperlambat proses dan mengurangi efisiensi operasional keseluruhan. Meskipun saat ini sudah ada program *BPOMSHARE* di Balai Besar POM Banda Aceh, namun belum mampu untuk mengakomodir integrasi data yang ada, dikarenakan tidak semua perangkat komputer dan laptop mendukung program ini. Ketidakmampuan untuk berbagi data dengan lancar antar unit kerja bukan hanya merugikan koordinasi internal, tetapi juga berdampak pada kualitas layanan yang disediakan kepada publik. Infrastruktur TI yang tidak terkoordinasi dengan baik ini menghasilkan duplikasi pekerjaan, meningkatkan potensi untuk kesalahan, dan

mengancam integritas serta keamanan data yang dikelola oleh BPOM, yang sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik.

Untuk memperkuat tata kelola data dan efisiensi operasional, Balai Besar POM di Banda Aceh berencana mengintegrasikan seluruh aplikasi dan sistem informasi ke dalam server terpusat BPOM yang terhubung dengan Pusat Data Nasional (PDN). Integrasi ini bertujuan untuk memastikan konsistensi, keamanan, dan ketersediaan data lintas unit kerja secara real-time, sekaligus mendukung implementasi *single data platform* yang menjadi arah kebijakan transformasi digital pemerintah.

Selain itu, sebagai bentuk kesiapan menghadapi potensi gangguan teknis dan ancaman siber, Balai Besar POM di Banda Aceh juga akan mengembangkan *Disaster Recovery Center (DRC)* dan sistem keamanan siber internal yang berfungsi untuk menjaga kontinuitas layanan dan melindungi data strategis dari risiko kehilangan, peretasan, atau kerusakan. Sistem ini akan dilengkapi dengan mekanisme pencadangan data otomatis, enkripsi berlapis, serta audit keamanan secara berkala.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan TI yang terintegrasi, tangguh, dan andal, sehingga seluruh proses pengawasan, pengujian, dan layanan publik dapat berjalan lebih cepat, aman, dan transparan.

1.2.3 Peluang (*Opportunity*)

Peluang menggambarkan analisis atau perencanaan biasanya merujuk pada kesempatan atau potensi yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan atau pengembangan suatu sistem, organisasi, atau kegiatan. Secara lebih spesifik, merefleksikan peluang berarti melihat kembali situasi atau kondisi yang ada untuk menilai potensi atau kesempatan yang mungkin belum dimanfaatkan secara maksimal. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Banda Aceh untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan obat dan makanan:

1. Kolaborasi dengan stakeholders

Kolaborasi dengan stakeholders adalah suatu bentuk kerja sama yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran atau kepentingan dalam

pengawasan obat dan makanan. Stakeholders dapat mencakup pemerintah daerah, lembaga riset, pelaku usaha, komunitas kesehatan, lembaga pendidikan, hingga masyarakat umum. Kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan bersama, terutama dalam memastikan produk yang beredar di pasar aman, berkualitas, dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan.

Melalui kolaborasi dan kerjasama Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh dukungan dalam berbagai aspek, seperti kebijakan, sumber daya, maupun informasi yang dapat memperkuat pengawasan. Misalnya, dengan melibatkan pemerintah daerah, dapat memperoleh data terkait tren konsumsi produk di masyarakat, serta informasi tentang potensi risiko produk yang perlu diawasi lebih ketat. Selain itu, bekerja sama dengan lembaga riset atau universitas dapat membuka peluang untuk melakukan penelitian bersama yang dapat memperdalam pemahaman tentang bahan atau produk tertentu yang sedang tren di pasar.

Pelaku usaha, terutama UMKM dan masyarakat juga merupakan stakeholder penting. Kolaborasi dengan mereka memungkinkan untuk memberikan edukasi, pelatihan, serta bantuan teknis dalam memenuhi standar keamanan produk. Dengan meningkatkan kesadaran dan kapasitas pelaku UMKM dan masyarakat, dapat dipastikan bahwa lebih banyak produk yang memenuhi standar dan lebih sedikit produk ilegal atau berbahaya yang beredar.

Secara keseluruhan, kolaborasi dengan stakeholders memungkinkan Balai Besar POM di Banda Aceh untuk bekerja lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas pengawasan serta memperkuat sistem pengawasan yang ada. Ini juga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, dengan tujuan akhir menciptakan pasar yang lebih aman bagi konsumen dan mendukung perkembangan UMKM.

2. Peningkatan kesadaran masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat adalah upaya strategis yang dilakukan untuk memastikan masyarakat memahami pentingnya keamanan, mutu, dan manfaat produk obat dan makanan. Balai Besar POM di Banda Aceh berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dan kritis terhadap produk yang beredar di pasaran.

Upaya ini dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti kampanye publik, penyebaran informasi melalui media sosial, seminar, serta pelatihan yang melibatkan komunitas lokal. Masyarakat diajarkan untuk mengenali ciri-ciri produk yang aman, membaca label kemasan dengan teliti, dan memahami izin edar resmi dari BPOM. Dengan pengetahuan ini, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih produk yang dikonsumsi, menghindari produk ilegal, palsu, atau berbahaya.

Sebagai bagian dari strategi komunikasi publik, Balai Besar POM di Banda Aceh juga memanfaatkan media lokal, platform digital, serta peran influencer daerah untuk menyebarkan pesan edukatif berbasis narasi positif tentang BPOM. Pendekatan ini dilakukan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dengan cara yang lebih menarik, relevan, dan mudah dipahami. Melalui kolaborasi dengan jurnalis lokal, content creator, dan tokoh muda berpengaruh, pesan tentang keamanan pangan dan pengawasan obat dapat dikemas secara kreatif dalam bentuk kampanye digital, video pendek, podcast, dan konten media sosial yang mendorong partisipasi publik.

Melalui peningkatan kesadaran masyarakat, Balai Besar POM di Banda Aceh tidak hanya melindungi konsumen dari risiko kesehatan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung keberadaan produk-produk lokal yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, masyarakat menjadi mitra aktif dalam pengawasan, membantu BPOM dalam menciptakan pasar yang sehat dan bebas dari produk yang merugikan.

3. Pertumbuhan pasar dan peningkatan daya saing industri/produk obat dan makanan dalam negeri

Pertumbuhan pasar produk obat dan makanan di Aceh menunjukkan tren positif seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap produk lokal yang berkualitas, aman, dan berdaya saing tinggi. Minyak nilam dan kopi merupakan dua komoditas unggul di Aceh dalam pengembangan industri kreatif, kosmetik, herbal, dan pangan olahan yang bernilai ekonomi tinggi. Produk-produk berbasis bahan alam ini tidak hanya mencerminkan potensi sumber daya lokal, tetapi juga menjadi simbol kemandirian industri daerah yang mampu bersaing di pasar nasional maupun ekspor.

Minyak nilam Aceh dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia karena kadar patchouli alcohol-nya yang tinggi. Komoditas ini menjadi bahan baku utama bagi industri parfum, kosmetik, aromaterapi, serta produk herbal. Sementara itu, kopi Gayo dan kopi Aceh Ulee Kareng telah menjadi ikon pangan olahan dengan nilai tambah yang terus meningkat, tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai bahan inovatif untuk produk kosmetik, perawatan tubuh, dan pangan fungsional. Kolaborasi antara pelaku industri, pemerintah daerah, dan Balai Besar POM di Banda Aceh telah memperkuat sistem pengawasan dan pendampingan bagi UMKM pengolah kedua komoditas ini agar mampu memenuhi standar keamanan, mutu, dan perizinan yang berlaku.

Balai Besar POM di Banda Aceh berperan aktif sebagai fasilitator dan mitra pembinaan melalui kegiatan edukasi keamanan pangan, pelatihan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), pendampingan perizinan edar, hingga asistensi sertifikasi halal dan uji laboratorium. Melalui kolaborasi ini, pelaku usaha tidak hanya memahami aspek regulasi, tetapi juga memperoleh bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pasar.

4. Adaptasi dengan perkembangan teknologi melalui peningkatan digitalisasi

Dalam menghadapi tantangan era digital dan tuntutan pelayanan publik yang cepat, transparan, serta akuntabel, Balai Besar POM di Banda Aceh terus beradaptasi melalui peningkatan pemanfaatan

teknologi dan digitalisasi dalam berbagai aspek tugas dan fungsinya. Digitalisasi menjadi kunci utama dalam memperkuat efektivitas pengawasan, mempercepat alur informasi, serta meningkatkan aksesibilitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Balai Besar POM di Banda Aceh terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui peningkatan digitalisasi layanan publik dan pengawasan, salah satunya dengan pemanfaatan Anjungan Tele-Yanblik Mandiri (ATM BPOM). Inovasi ini merupakan bagian dari transformasi digital BPOM yang bertujuan untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat serta pelaku usaha. Melalui ATM BPOM, masyarakat dapat secara mandiri memperoleh berbagai layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan terkait obat dan makanan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.

ATM BPOM mengintegrasikan sistem tele-layanan dan informasi berbasis digital yang memungkinkan interaksi dua arah secara daring antara petugas Balai Besar POM dan masyarakat. Hal ini mempermudah proses pelayanan publik, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan pendampingan terkait pendaftaran produk, izin edar, serta penerapan standar keamanan pangan dan obat. Dengan sistem ini, pelayanan menjadi lebih efisien, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

Bagi Balai Besar POM di Banda Aceh, penerapan ATM BPOM juga menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan pelayanan hingga ke wilayah yang jauh dari pusat kota, sekaligus meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya keamanan dan mutu produk yang dikonsumsi. Digitalisasi ini mendukung prinsip *easy access* dan *smart service*, di mana pelayanan publik tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga pada kemudahan dan transparansi informasi.

Implementasi ATM BPOM di Aceh menunjukkan komitmen lembaga dalam mengoptimalkan teknologi informasi untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pelayanan publik. Adaptasi ini tidak hanya mencerminkan modernisasi sistem birokrasi, tetapi juga mendukung visi

BPOM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Melalui inovasi digital seperti ATM BPOM, Balai Besar POM di Banda Aceh semakin mampu memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat serta memperkuat daya saing industri lokal yang patuh terhadap standar keamanan, mutu, dan kehalalan produk.

5. Inovasi produk dan layanan kesehatan

Inovasi produk dan layanan kesehatan merupakan proses pengembangan dan penerapan ide baru untuk menciptakan solusi yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pengembangan produk kesehatan seperti obat, suplemen, dan makanan hingga layanan yang lebih mudah diakses dan berbasis teknologi. Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki peran strategis tidak hanya sebagai institusi pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam mendorong inovasi di bidang produk dan layanan kesehatan. Dalam hal ini, Balai Besar POM di Banda Aceh turut mendukung pengembangan produk obat, pangan, kosmetik, dan suplemen kesehatan lokal yang inovatif, aman, dan berkualitas, khususnya yang berbasis pada potensi sumber daya alam dan kearifan lokal Aceh.

Dalam menghadapi dinamika industri kesehatan dan pangan yang semakin kompetitif, Balai Besar POM di Banda Aceh terus beradaptasi dengan mengembangkan pendekatan kolaboratif antara regulator, akademisi, dan pelaku usaha lokal. Salah satu strategi unggulan yang diimplementasikan adalah fasilitasi inkubasi inovasi produk berbasis sumber daya alam (SDA) lokal bersama universitas. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem inovasi daerah melalui hilirisasi hasil riset dan komersialisasi produk berbasis kearifan lokal Aceh.

Aceh memiliki potensi SDA yang sangat kaya, seperti nilam, kopi gayo, rempah-rempah, jahe merah, pegagan, serta hasil laut seperti rumput laut dan ikan. Potensi ini menjadi bahan utama dalam pengembangan berbagai produk inovatif, mulai dari kosmetik herbal, suplemen

kesehatan, minuman fungsional, hingga aromaterapi alami. Melalui kolaborasi dengan Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Teuku Umar (UTU), dan Balai Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Balai Besar POM di Banda Aceh berperan sebagai fasilitator inkubasi yang memberikan pendampingan teknis terhadap proses uji keamanan, stabilitas, dan mutu produk hasil riset kampus.

Program ini juga didukung oleh pengembangan mekanisme “fast-track evaluation system” untuk produk berbasis riset yang memiliki potensi tinggi untuk dikomersialisasikan. Melalui sistem percepatan evaluasi ini, dapat mengurangi waktu proses penilaian dokumen dan pengujian laboratorium dengan tetap menjamin prinsip keamanan dan mutu produk. Sistem ini juga diintegrasikan dengan dashboard evaluasi digital untuk memantau status produk inovatif secara real time dan meningkatkan transparansi layanan publik.

Implementasi strategi ini telah menghasilkan berbagai produk unggulan daerah seperti “Essential Oil Nilam Aceh”, “Minuman Herbal Gayo”, dan “Masker Rumput Laut Aceh Besar”, yang dikembangkan melalui kolaborasi riset dan pendampingan teknis. Selain memperkuat daya saing daerah, inisiatif ini juga mendukung agenda nasional hilirisasi hasil riset dan peningkatan nilai tambah SDA lokal, sejalan dengan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2025–2029 serta prioritas BPOM dalam mendorong inovasi, keamanan, dan kemandirian industri obat dan makanan.

Dengan demikian, strategi ini memperkuat posisi Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai lembaga pengawasan yang memfasilitasi tumbuhnya produk lokal aman, berkualitas, dan berdaya saing global.

6. Pemberdayaan UMKM

Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya standar keamanan produk. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang regulasi, UMKM dapat memproduksi barang yang aman dan memenuhi standar kualitas yang diperlukan. Ini akan membuka peluang lebih besar bagi

produk lokal untuk bersaing di pasar yang lebih luas, baik di pasar domestik maupun internasional.

Selain itu, pemberdayaan UMKM juga melibatkan fasilitasi dalam membangun jejaring usaha. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun sektor privat, UMKM dapat memperoleh akses ke pasar yang lebih besar, pengetahuan baru, serta teknologi yang dapat mempercepat pertumbuhan usaha mereka. Dengan pemberdayaan yang tepat, UMKM tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga berkembang menjadi sektor usaha yang lebih kuat, mampu menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

Balai Besar POM di Banda Aceh terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung tumbuh kembang pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pangan olahan, kosmetik, dan obat tradisional. Upaya ini diwujudkan melalui program pemberdayaan “UMKM Naik Kelas”, yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap regulasi keamanan dan mutu produk.

Program ini berfokus pada pendampingan intensif dan pelatihan rutin dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), serta Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Melalui fasilitasi sertifikasi dan pelatihan teknis, UMKM di Aceh diharapkan dapat menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu, aman konsumsi, serta memiliki daya saing di pasar nasional dan ekspor.

Dalam implementasinya, Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan sinergi lintas sektor dengan Dinas Perindustrian dan UMKM, Dinas Kesehatan, serta Balai Sertifikasi dan Lembaga Pendamping UMKM daerah. Kolaborasi ini memastikan adanya pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha, mulai dari tahap produksi, registrasi produk, hingga pemasaran. Selain itu, Balai Besar POM di Banda Aceh juga mendorong digitalisasi layanan melalui Anjungan Tele-Yanblik Mandiri (ATM BPOM) agar proses konsultasi dan pengajuan izin edar lebih cepat dan efisien.

Program “UMKM Naik Kelas” di Aceh telah menghasilkan berbagai capaian, antara lain peningkatan jumlah UMKM bersertifikat CPPOB dan CPKB, serta kemunculan produk lokal unggulan seperti kopi kemasan Gayo, kosmetik herbal berbasis nilam, dan minuman fungsional rempah Aceh. Upaya ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas produk lokal, tetapi juga mendukung agenda nasional dalam memperkuat kemandirian industri obat dan makanan dalam negeri serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Dengan memperluas kemitraan, memperkuat kapasitas pelaku usaha, dan memanfaatkan teknologi digital, Balai Besar POM di Banda Aceh berkomitmen menjadikan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang berdaya saing, inovatif, dan berorientasi mutu.

7. Penegakan regulasi terhadap produk impor

Pentingnya penegakan regulasi terhadap produk impor terletak pada perlindungan konsumen dari potensi risiko yang mungkin timbul akibat produk yang tidak sesuai standar, seperti produk yang mengandung bahan berbahaya, kadaluarsa, atau tidak memiliki izin edar yang sah. Di sisi lain, penegakan ini juga bertujuan untuk mencegah praktik perdagangan yang tidak adil, seperti penyelundupan atau pemasaran produk palsu yang dapat merugikan perekonomian negara dan kesehatan masyarakat.

Balai Besar POM di Banda Aceh, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan di Provinsi Aceh, memainkan peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap produk impor. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan pemeriksaan terhadap produk yang masuk ke pasar, memastikan bahwa produk tersebut telah mendapatkan izin edar dari BPOM, serta memeriksa keaslian label dan informasi yang tertera pada kemasan. Selain itu, prosedur pengawasan yang ketat juga melibatkan uji sampel produk impor untuk memastikan bahwa produk tersebut aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penegakan regulasi ini tidak hanya melibatkan pengawasan pada titik masuk produk, tetapi juga mencakup pengawasan yang lebih luas selama produk tersebut beredar di pasar. Hal ini memastikan bahwa produk impor yang dijual kepada konsumen tetap aman digunakan sepanjang masa berlakunya. Penegakan regulasi terhadap produk impor juga memberikan dorongan bagi industri dalam negeri untuk meningkatkan daya saing produk mereka, dengan memastikan bahwa mereka tidak kalah dalam hal kualitas dan keamanan dibandingkan dengan produk yang berasal dari luar negeri.

Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan, mutu, dan legalitas produk obat dan makanan yang masuk wilayah Aceh, termasuk produk impor. Seiring dengan meningkatnya arus perdagangan internasional, pengawasan terhadap produk impor menjadi semakin kompleks dan menuntut koordinasi antarinstansi yang efektif.

Untuk itu, Balai Besar POM di Banda Aceh menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas pelabuhan dengan mitra strategis seperti Bea Cukai, Karantina, dan pihak terkait lainnya. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk impor yang masuk ke Aceh telah memenuhi persyaratan regulasi nasional dan standar keamanan pangan dan obat. Melalui koordinasi yang erat, Balai Besar POM di Banda Aceh dapat melakukan pengawasan lebih awal dan mengurangi risiko peredaran produk ilegal atau tidak memenuhi standar mutu.

Selain itu, Balai Besar POM di Banda Aceh memanfaatkan intelligence data system dan teknologi informasi untuk mendeteksi potensi produk impor ilegal secara proaktif. Sistem ini mengintegrasikan data perdagangan, laporan pengawasan, dan informasi intelijen untuk melakukan analisis risiko secara cepat. Dengan pendekatan berbasis data ini, langkah pengawasan dapat difokuskan pada produk dan pelaku usaha yang memiliki potensi risiko tinggi, sehingga proses pemeriksaan lebih efisien dan tepat sasaran.

Implementasi strategi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan regulasi produk impor, menekan peredaran produk ilegal,

serta melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat konsumsi produk yang tidak memenuhi persyaratan. Sinergi lintas instansi dan pemanfaatan sistem intelijen juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengawasan, sekaligus memperkuat posisi Aceh sebagai wilayah yang patuh terhadap regulasi nasional obat dan makanan.

1.2.4 Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga Balai Besar POM di Banda Aceh dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*):

1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan

Perkembangan perdagangan daring (e-commerce) di Aceh meningkat pesat, yang membuka peluang sekaligus risiko bagi keamanan dan mutu produk obat dan makanan. Produk yang dijual secara online sering kali tidak melalui jalur resmi dan berpotensi ilegal, mengandung bahan berbahaya, atau menyesatkan konsumen melalui klaim palsu. Dalam menghadapi tantangan ini, Balai Besar POM di Banda Aceh menekankan pentingnya pengawasan berbasis teknologi dan edukasi publik.

Salah satu langkah strategis adalah pembentukan Cyber Surveillance Team di bawah unit pengawasan Balai Besar POM di Banda Aceh. Tim ini bertugas memantau aktivitas perdagangan online, mengidentifikasi praktik penjualan produk ilegal, serta menganalisis pola risiko berdasarkan informasi digital dan laporan masyarakat. Pendekatan berbasis tim khusus ini, memungkinkan Balai Besar POM di Banda Aceh untuk respon cepat terhadap ancaman siber dan penjualan produk ilegal di platform e-commerce.

Selain itu, dilaksanakan juga program sosialisasi literasi konsumen digital, yang bekerjasama dengan media lokal, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai cara mengenali produk aman, membaca label, dan

memverifikasi izin edar sebelum melakukan transaksi online. Edukasi ini juga mencakup pemahaman tentang risiko keamanan, klaim menyesatkan, dan mekanisme pelaporan produk ilegal.

Strategi ini tidak hanya memperkuat pengawasan online, tetapi juga meningkatkan perlindungan konsumen digital yang mampu menekan peredaran produk ilegal di e-commerce, mengurangi risiko kesehatan masyarakat, dan memperkuat ekosistem perdagangan daring yang aman dan terpercaya dengan pengawasan yang berbasis teknologi dan edukasi masyarakat.

2. Dinamika pasar yang cepat

Perkembangan pasar obat dan makanan di Aceh sangat dinamis, terutama dengan masuknya produk baru baik dari dalam maupun luar negeri. Perubahan tren konsumen, inovasi produk berbasis herbal, nutraceutical, kosmetik, dan pangan olahan lokal memerlukan pengawasan yang cepat dan adaptif. Balai Besar POM di Banda Aceh menekankan perlunya sistem peringatan dini (*early warning system*) yang mengintegrasikan informasi tren pasar, laporan pengaduan konsumen, serta data intelijen pengawasan. Sistem ini memungkinkan Balai Besar POM di Banda Aceh untuk mengidentifikasi potensi risiko lebih awal, termasuk produk baru yang belum memiliki izin edar atau berpotensi tidak memenuhi standar keamanan.

Dalam rangka mendukung pengembangan produk inovatif daerah yang aman, bermutu, dan berdaya saing, dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan peraturan teknis agar lebih adaptif terhadap inovasi produk baru dengan melakukan pendampingan terhadap pengembangan kopi herbal fungsional berbasis bahan alami khas Aceh seperti ginseng lokal, jahe merah, dan pasak bumi. Melalui kegiatan bimbingan teknis, konsultasi registrasi, serta penguatan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi pelaku UMKM, Balai Besar POM di Banda Aceh berperan aktif dalam memastikan bahwa formulasi inovatif tersebut tetap memenuhi ketentuan keamanan dan mutu yang berlaku. Selain itu, dilakukan pula koordinasi dengan unit teknis di pusat untuk harmonisasi

regulasi dan penyusunan data ilmiah pendukung guna memfasilitasi klaim manfaat produk. Upaya ini menunjukkan komitmen dalam menjadikan peraturan teknis lebih responsif terhadap dinamika inovasi produk, tanpa mengurangi perlindungan terhadap kesehatan masyarakat.

Selain itu, Balai Besar POM di Banda Aceh menyesuaikan peraturan teknis agar lebih fleksibel terhadap inovasi produk. Seperti penerapan fast-track evaluation system untuk produk riset atau produk inovatif berbasis SDA lokal, serta penyesuaian persyaratan uji keamanan dan label agar tetap sesuai standar, namun tidak menghambat masuknya produk baru ke pasar. Pendekatan adaptif ini memungkinkan Balai Besar POM di Banda Aceh untuk tetap menjaga keamanan dan mutu produk sekaligus mendukung tumbuhnya industri lokal yang inovatif.

Strategi ini juga mendorong kolaborasi dengan universitas, lembaga riset, UMKM, dan asosiasi industri, sehingga pengawasan menjadi proaktif dan berbasis data, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha untuk berinovasi dengan aman dan bertanggung jawab.

3. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan

Dalam upaya memperkuat penerimaan masyarakat dan pelaku industri terhadap kebijakan serta program pengawasan obat dan makanan, Balai Besar POM di Banda Aceh melaksanakan berbagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan komunikasi publik, advokasi kebijakan, serta kemitraan dengan pelaku usaha. Upaya ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama bahwa pengawasan obat dan makanan bukan semata kewajiban regulatif, melainkan investasi bersama dalam melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing produk lokal Aceh.

Sebagai bagian dari strategi memperkuat komunikasi risiko dan advokasi kebijakan publik, Balai Besar POM di Banda Aceh secara konsisten menyelenggarakan kegiatan edukatif dan sosialisasi, antara lain kampanye *Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)* melalui program

“Ayo Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa)” di lingkungan sekolah, pasar tradisional, dan komunitas masyarakat. Selain itu, sejak tahun 2022 Balai Besar POM di Banda Aceh memanfaatkan inovasi Sanger Ureung Aceh (Sharing Informasi Aneuk Nanggroe dan Edukasi Registrasi) yang merupakan program inovasi pengawasan edukasi pangan aman di warung kopi dengan melibatkan fasilitator di 23 Kabupaten/Kota dan SAKA POM di Aceh. Kegiatan yang dilakukan meliputi KIE pangan aman, pemeriksaan sarana warung kopi, pengujian makanan pendamping kopi dan pojok konsultasi di warung kopi.

Balai Besar POM di Banda Aceh juga memanfaatkan media sosial dan kanal komunikasi digital lokal sebagai sarana diseminasi informasi yang cepat dan efektif untuk menangkal misinformasi atau hoaks terkait obat, kosmetik, dan pangan olahan. Kegiatan yang dilakukan melalui podcast yang berkolaborasi dengan pelaku usaha, akademisi, Pemerintah Daerah, lembaga maupun praktisi.

Masalah yang paling nyata di wilayah Aceh adalah masih ditemukan garam curah yang hasil pengujiannya tidak memenuhi syarat. Hal ini masih terjadi karena disinyalir pengusaha mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku sehingga perlu intervensi terkait masalah ini. Selain itu, kepercayaan pelaku usaha terhadap kebijakan nasional juga dipengaruhi oleh kemampuan laboratorium di balai, walaupun secara keseluruhan kemampuan pengujian sudah baik, namun untuk beberapa parameter pengujian masih membutuhkan waktu lebih lama.

4. Pengawasan di wilayah terpencil

Pengawasan di wilayah terpencil merupakan tantangan besar dalam memastikan bahwa produk obat dan makanan yang beredar aman dan memenuhi standar kualitas, meskipun akses terhadap daerah tersebut terbatas. Di wilayah ini, seringkali terdapat kesulitan dalam melakukan pemeriksaan langsung terhadap produk yang dipasarkan, mengingat keterbatasan infrastruktur, transportasi, dan jumlah sumber daya manusia yang tersedia.

Balai Besar POM di Banda Aceh, menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa produk yang masuk ke pasar di wilayah terpencil telah melalui proses pemeriksaan yang tepat. Produk yang tidak diawasi dengan baik dapat membahayakan konsumen, karena ada kemungkinan adanya produk ilegal, palsu, atau yang sudah kedaluwarsa yang beredar tanpa pengawasan yang memadai.

Untuk mengatasi hal ini, pendekatan berbasis teknologi dan digitalisasi dapat sangat membantu, penguatan kerjasama antara lembaga pengawas, pemerintah daerah, dan pelaku industri untuk meningkatkan pengawasan di wilayah terpencil serta memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah terpencil mengenai tanda-tanda produk yang aman dan cara melaporkan jika mereka menemukan produk yang tidak sesuai standar. Hal ini membantu menciptakan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan yang mereka konsumsi. Dengan langkah-langkah tersebut, meskipun pengawasan di wilayah terpencil penuh tantangan, risiko peredaran produk ilegal atau berbahaya dapat diminimalkan.

Salah satu langkah strategis yang diterapkan adalah pemanfaatan Mobile Laboratory (Mobile Lab) dan Pos Pengawasan Keliling. Fasilitas ini memungkinkan petugas melakukan uji cepat dan inspeksi langsung di lapangan tanpa harus bergantung pada infrastruktur laboratorium utama. Melalui Mobile Lab, dapat dijangkau daerah-daerah yang sulit diakses seperti Simeulue, Aceh Singkil, dan wilayah perbatasan, untuk melakukan pengujian parameter keamanan pangan, obat tradisional, dan kosmetik. Selain pengujian, Mobile Lab juga dimanfaatkan untuk kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha lokal, sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan sekaligus dengan kegiatan pembinaan.

Di samping itu, untuk memperkuat jejaring masyarakat sebagai pengawas pangan komunitas dapat dibentuk Kader Keamanan Pangan Desa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas, dan lembaga pendidikan. Kader ini dilatih untuk mengenali ciri produk yang tidak memenuhi syarat, melakukan edukasi kepada

masyarakat sekitar, dan melaporkan temuan secara cepat kepada petugas Balai Besar POM atau pemerintah daerah. Pendekatan partisipatif ini terbukti efektif dalam memperluas jangkauan pengawasan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan dan mutu produk yang dikonsumsi.

5. Isu lingkungan yang berkelanjutan

Isu lingkungan dan keberlanjutan menjadi semakin strategis dalam dinamika pasar saat ini, mendorong tuntutan terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Perubahan ini menciptakan tantangan bagi Balai Besar POM di Banda Aceh dalam menyesuaikan kerangka regulasi dan pengawasan obat dan makanan.

Ancaman yang dihadapi meliputi potensi pergeseran cepat dalam standar industri yang dipengaruhi oleh kebutuhan keberlanjutan, serta tantangan dalam mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam proses regulasi dan pengawasan yang ada. Selain itu, ada risiko reputasi jika dianggap tidak cukup responsif atau proaktif dalam mengatasi isu lingkungan, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga.

Balai Besar POM di Banda Aceh berkomitmen mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam seluruh kegiatan operasional dan laboratorium. Sebagai lembaga pengawas yang memiliki laboratorium uji produk obat, pangan, dan kosmetik, Balai Besar POM di Banda Aceh menerapkan konsep Green Laboratory yang menekankan efisiensi energi, penggunaan peralatan hemat energi, serta pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya secara maksimal. Dalam pengelolaan limbah laboratorium dan operasional, diterapkan Zero Waste Management, termasuk pemisahan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), limbah organik, dan limbah non-organik, dengan standar prosedur pengelolaan yang sesuai ketentuan lingkungan nasional.

Penerapan dan sertifikasi ISO 14001: Manajemen Lingkungan sebagai standar internasional pengelolaan lingkungan berkelanjutan tidak hanya

menjadi indikator kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, tetapi juga memperkuat tata kelola internal, efisiensi sumber daya, dan akuntabilitas operasional. Upaya lainnya termasuk digitalisasi layanan untuk mengurangi penggunaan kertas, penghematan energi listrik dan air.

6. Terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa)

Dalam menghadapi potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang berdampak pada keamanan obat dan pangan di wilayah Aceh, diperlukan penguatan mekanisme tanggap darurat yang cepat dan efektif. Salah satu langkah strategis adalah pembentukan Emergency Response Team (ERT) yang khusus menangani pengawasan obat dan pangan selama KLB. Tim ini terdiri dari personel teknis laboratorium, pengawas, dan staf operasional yang terlatih untuk melakukan inspeksi, sampling, dan analisis produk secara cepat di lapangan.

Selain itu, diperlukannya SOP cepat tanggap yang terintegrasi dengan laboratorium regional untuk memastikan pemeriksaan laboratorium dan pelaporan hasil dapat dilakukan dalam waktu singkat. SOP ini mencakup prosedur komunikasi internal, koordinasi dengan pemerintah daerah, penanganan limbah berbahaya, serta strategi mitigasi risiko terhadap masyarakat dan pelaku usaha.

Dengan pembentukan Emergency Response Team dan SOP cepat tanggap yang didukung laboratorium regional, Balai Besar POM di Banda Aceh dapat memastikan pengawasan obat dan pangan tetap efektif dan responsif terhadap KLB, meminimalkan risiko kesehatan masyarakat, serta memperkuat sistem pengawasan yang adaptif, profesional, dan terkoordinasi dengan baik.

7. Krisis kesehatan global

Dalam menghadapi potensi krisis kesehatan global, seperti pandemi, dibutuhkan mekanisme Crisis Preparedness Plan yang terintegrasi dalam sistem manajemen risiko. Rencana ini mencakup prosedur deteksi dini, pengawasan produk obat dan pangan strategis, serta langkah mitigasi risiko untuk melindungi kesehatan masyarakat secara cepat dan efektif.

Protokol ini juga menjadi pedoman internal bagi pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh dalam menghadapi situasi darurat yang berskala nasional atau global.

Selain itu, penguatan jejaring komunikasi publik lintas instansi menjadi langkah penting untuk memastikan informasi terkini terkait keamanan obat, pangan, dan produk kesehatan tersampaikan secara cepat kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Balai Besar POM di Banda Aceh dapat memanfaatkan platform digital, media sosial, serta forum koordinasi rutin dengan Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana, dan lembaga terkait untuk memperkuat respons terpadu saat krisis.

Dengan implementasi Crisis Preparedness Plan yang efektif dan jejaring komunikasi publik yang kuat, dapat dipastikan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tetap adaptif, akurat, dan mendukung perlindungan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan dalam situasi krisis global.

Tabel 1.2 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

<i>Strength</i> 1. Komitmen kepemimpinan yang kuat. 2. Kerjasama lintas sektor dan jaringan kerjasama yang solid. 3. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM. 4. Kemampuan Laboratorium pengujian yang terakreditasi. 5. Pemanfaatan teknologi dan inovasi. 6. Program edukasi pemberdayaan terstruktur. 7. Penyempurnaan proses bisnis yang berkelanjutan.	<i>Weakness</i> 1. Keterbatasan dan distribusi sumber daya manusia (SDM). 2. Adanya gap kompetensi pegawai. 3. Keterbatasan wewenang penegakan hukum. 4. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki. 5. Biaya pengujian yang tinggi menjadi hambatan kepatuhan UMKM terhadap kewajiban registrasi produk. 6. Keterbatasan luas prasarana gedung. 7. Sistem TI belum terintegrasi secara optimal.
<i>Opportunities</i> 1. Kolaborasi dengan stakeholders. 2. Peningkatan kesadaran masyarakat. 3. Pertumbuhan pasar dan peningkatan daya saing industri/ produk obat dan makanan dalam negeri. 4. Adaptasi dengan perkembangan teknologi melalui peningkatan digitalisasi. 5. Inovasi produk dan layanan kesehatan. 6. Pemberdayaan UMKM. 7. Penegakan regulasi terhadap produk impor.	<i>Threats</i> 1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan. 2. Dinamika pasar yang cepat. 3. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan. 4. Pengawasan di wilayah terpencil. 5. Isu lingkungan yang berkelanjutan. 6. Terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa). 7. Krisis kesehatan global.

BAB II

VISI, MISI, BUDAYA ORGANISASI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Penyusunan Rencana Strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang dihadapi di masa depan, Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai Unit Pelaksana Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tugas dan fungsi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi Aceh diharapkan mampu melihat perubahan lingkungan yang dinamis dan mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menetapkan visi, misi, budaya organisasi dan tujuan yang juga menjadi visi, misi, budaya organisasi dan tujuan Balai Besar POM di Banda Aceh 2025-2029.

2.1 Visi

Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Visi Balai Besar POM di Banda Aceh disusun sesuai dengan Visi BPOM 2025-2029, yaitu:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi dalam memberikan standar tertinggi regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat

diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi Balai Besar POM di Banda Aceh mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

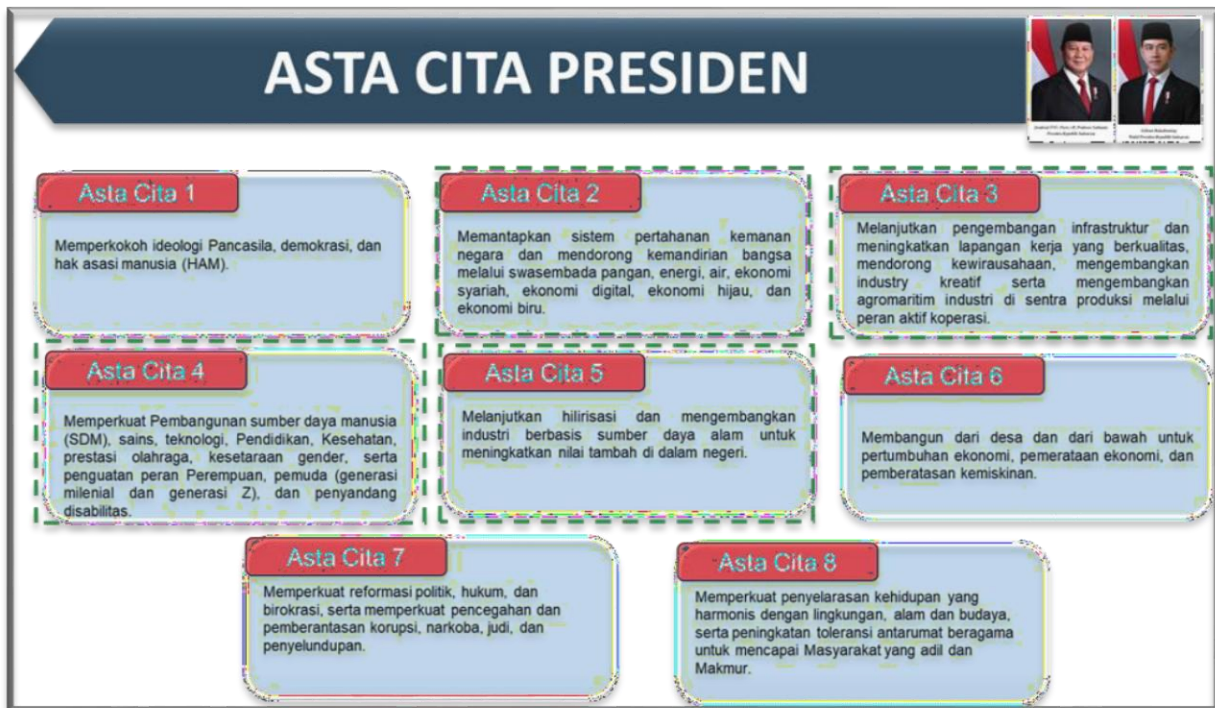
- 1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
- 3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
- 4. Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat, maka akan diterapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of

Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di tingkat daerah, Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi BPOM. Visi ini menekankan pentingnya peran pengawasan yang tidak hanya menjamin keamanan produk, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan industri yang berdaya saing. Dengan menjalankan tugas-tugas tersebut secara konsisten dan profesional, Balai Besar POM di Banda Aceh berkontribusi langsung dalam membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang unggul, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga mendukung tercapainya visi BPOM secara menyeluruh.

2.2 Misi

Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki peran penting dalam mengimplementasikan misi Badan POM di tingkat regional. Balai Besar POM di Banda Aceh berperan sebagai pelaksana pengawasan sekaligus sebagai fasilitator transformasi sistem keamanan obat dan makanan di wilayah Aceh. Dalam rangka mencapai visi tersebut, dirumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.41 Misi Terpilih (Asta cita)

BPOM utamanya mendukung pada **Asta Cita 4** yaitu **“Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”**, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3 dan 5** sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat**
Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi

lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi

pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

2.3 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Balai Besar POM di Banda Aceh mendukung tujuan BPOM 2025-2029:

Tabel 2.3 Tujuan BPOM 2025-2029

Tujuan BPOM	
1.	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.
2.	Terwujudnya masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.
3.	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
4.	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5.	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

- 1) **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.** Tujuan ini menegaskan komitmen Balai Besar POM di Banda Aceh dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas
- 2) **Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.** Tujuan ini untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi

konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.

- 3) **Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.** Tujuan ini menggaris bawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. Balai Besar POM di Banda Aceh berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
- 4) **Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.** Tujuan ini menekankan peran Balai Besar POM di Banda Aceh dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
- 5) **Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima.** Tujuan ini merupakan komitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan dalam memberikan layanan publik yang prima.

Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

2.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai Besar POM di Banda Aceh, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Banda Aceh akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Balai Besar POM di Banda Aceh berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Balai Besar POM di Banda Aceh berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar.
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. Balai Besar POM di Banda Aceh berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. Balai Besar POM di Banda Aceh harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi

yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.
- c. Jumlah desa pangan aman.
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, Balai Besar POM di Banda Aceh berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, Balai Besar POM di Banda Aceh berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan

berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Balai Besar POM di Banda Aceh.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, Balai Besar POM di Banda Aceh mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Balai Besar POM di Banda Aceh berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh
- b. Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh.
- c. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh.
- d. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh.

**Tabel 2.4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja
Balai Besar POM di Banda Aceh**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	IK.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IK.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
		IK.3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IK.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
		IK.5	Persentase PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IK.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	
		IK.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IK.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IK.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		ISK.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IK.11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan
		IK.12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
		IK.13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
		IK.14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
		IK.15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
		IK.16	Persentase sampel pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IK.16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
3.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IK.17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	
		ISK.18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
		ISK.19	Jumlah desa pangan aman
		ISK.20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	ISK.21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan
5.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	ISK.22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
6.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	ISK.23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
7.	Layanan Publik UPT yang prima	ISK.24	Indeks Pelayanan Publik UPT
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	ISK.25	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh
		ISK.26	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh
		ISK.27	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh
		ISK.28	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh

**Tabel 2.5 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan dan Indikator
Balai Besar POM di Banda Aceh periode 2025-2029**

Visi:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> 1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)

MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN
		Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi <i>Indikator:</i> <i>Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i>
		Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai estándar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> 1. <i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> 2. <i>Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> 3. <i>Jumlah desa pangan aman</i> 4. <i>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>

MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i>
		Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator:</i> 1. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh 2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh 3. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh 4. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh

Muatan Indikasi Risiko pada Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Banda Aceh

Muatan indikasi risiko pada sasaran kegiatan Balai Besar POM di Banda Aceh dalam Renstra 2025–2029 merupakan uraian mengenai potensi hambatan, ketidakpastian, atau kondisi yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan strategis Balai dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan. Indikasi risiko ini disusun untuk memberikan gambaran awal mengenai faktor-faktor yang berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan kegiatan. Dengan mengenali risiko sejak tahap perencanaan, Balai dapat menyiapkan langkah mitigasi yang sistematis dan memastikan kegiatan pengawasan, pelayanan publik, penegakan hukum, serta pembinaan daerah dapat berjalan efektif, adaptif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan nasional dan misi BPOM.

Adapun muatan indikasi risiko pada sasaran kegiatan Balai Besar POM di Banda Aceh 2025-2029, sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Muatan Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan
Balai Besar POM di Banda Aceh**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Sarana tujuan pengawasan dan sampling menolak pelaksanaan pemeriksaan dan sampling oleh petugas di wilayah kerja UPT	1. Memaparkan tujuan pemeriksaan pada saat opening meeting dengan jelas sesuai target yang akan dicapai di sarana tersebut terkait pemeriksaan dan sampling. 2. Melakukan opening meeting dengan jajaran dari pihak sarana. 3. Membuat surat pemberitahuan kegiatan sampling kepada sarana yang ditargetkan.	Inspeksi
		Kesulitan dalam mencari sampel untuk memenuhi kategori yang tertuang dalam pedoman sampling	Mengajukan surat revisi perubahan rencana sampling ke Unit Pusat terkait pada TW IV	Inspeksi
		Kesalahan dalam input laporan hasil pengawasan pada SIPT	1. Petugas mengikuti pelatihan sampling pada IDEAS. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi bulanan sampling oleh ketua tim kerja.	Inspeksi
		Kondisi sampel rusak sebelum diserahkan ke TPS	1. Mengontrol penanganan sampel agar sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan selama di perjalanan. 2. Pengadaan perlengkapan sampling yang dibutuhkan sesuai yang dipersyaratkan.	Inspeksi
		Penyerahan antibiotik tanpa resep dokter di Apotek masih tinggi	1. KIE berkesinambungan kepada penanggung jawab sarana dan pelaku usaha tentang penggunaan antibiotik dengan resep dokter. 2. Penetapan sanksi sesuai dengan pedoman pola tindak lanjut.	Inspeksi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
		Sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi/Pangan Olahan yang menjadi target pemeriksaan tutup pada saat petugas akan melakukan pemeriksaan	1. Melakukan verifikasi dan menjadwalkan ulang pemeriksaan ke sarana. 2. Merevisi target sarana yang akan diperiksa.	Inspeksi
		Terdapat potensi dan benturan kepentingan antara petugas dan pelaku usaha	Melakukan update daftar potensi dan benturan kepentingan pegawai Balai Besar POM Banda Aceh	Inspeksi
		Petugas mengalami gangguan psikis pada saat inspeksi dan penindakan	Pendampingan oleh petugas keamanan	Inspeksi
		Mark Up pertanggungjawaban keuangan	1. Membuat Pakta Integritas. 2. Sosialisasi kepada petugas terkait integritas. 3. Implementasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.	Inspeksi
		Sarana tidak menindaklanjuti surat rekomendasi yang diterbitkan	1. Desk pembuatan CAPA kepada pelaku usaha. 2. Mengirimkan surat permintaan CAPA kedua setelah timeline permintaan pertama diabaikan.	Inspeksi
		Banyak parameter pengujian yang tidak dapat dilakukan	Melakukan monitoring ketersediaan barang persediaan per semester	Pengujian
		Terjadi kerusakan insidental pada instrumen pengujian	Perencanaan anggaran untuk perawatan alat dan instrumen	Pengujian
		Dokumen hasil pengujian tidak mampu telusur di SIPT	Melaporkan hasil pengujian (kesimpulan uji, hasil uji, tanggal pengujian dll) di Inovasi Rasa dari Hati sebagai back up	Pengujian
		Hasil Uji tidak menggambarkan penyebab KLB	1. Peningkatan Pemahaman petugas terkait juknis dalam melakukan Investigasi KLB KP. 2. Koordinasi dengan instansi terkait.	Pengujian
		Hasil Uji direkayasa sesuai permintaan pemilik sampel	Membuat IK penanganan pelanggan dan Penguji menandatangani Pakta Integritas	Pengujian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
		Terjadi kehilangan sampel Nappza	Tempat penyimpanan sampel dalam lemari terkunci, akses terbatas ke laboratorium serta pemasangan cctv	Pengujian
		Terjadi kerusakan sampel	Pemantauan kondisi ruang penyimpanan sampel	Pengujian
		Kemasan sampel rusak	Membuat dan menjalankan IK penanganan contoh	Pengujian
		Terjadi kesalahan dalam interpretasi hasil uji	Verifikasi laporan hasil uji oleh katim dan melakukan pemeriksaan kembali (investigasi) terhadap sampel TMS sesuai IK penanganan HULS	Pengujian
		personil terpapar cemaran produk biologi	Sosialisasi IK penanganan pencucian limbah produk biologi	Pengujian
		Terjadi korban jiwa, luka-luka bahkan kematian akibat bencana alam	Membuat jalur evakuasi hingga titik kumpul dan sosialisasi mitigasi bencana	Pengujian Tata Usaha
		Baku Pembanding menurun kualitasnya	Sosialisasi IK Penanganan Baku Pembanding dan pencatatan kondisi fisik baku	Pengujian
		Kebocoran hasil uji ke pihak yang tidak berwenang	Pembatasan akses data dengan password, Membuat dan menjalankan IK tentang Perlindungan Kerahasiaan Informasi	Pengujian Tata Usaha
		Potensi sengketa atau penolakan hasil uji oleh industri	Penerapan Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) mulai dari keabsahan sampel, baku pembanding terkontrol, reagen dan alat ukur terkalibrasi. Melakukan investigasi (HULS) sesuai standar. Menggunakan Metode yang sudah divalidasi dan terverifikasi	Pengujian
		Sampel regional rusak selama proses pengiriman ke laboratorium penguji	1. Peningkatan kompetensi petugas TPS Balai Besar POM di Banda Aceh melalui pelatihan pedoman sampling di ideas. 2. Membuat perjanjian kerja sama dengan pihak ekspedisi	Pengujian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
		Menaikan harga sampel untuk keuntungan pribadi	1. Membuat Pakta Integritas 2. Sosialisasi kepada petugas sampling dalam membuat pertanggung jawaban keuangan	Pengujian
		Sampel KLB diterima tidak dilengkapi dengan dokumen penetapan KLB, Kajian epidemiologis dan kronologis kejadian	Koordinasi dengan tim gerak cepat KLB Dinas Kesehatan kab/kota kepada Pemangku Kepentingan Daerah dalam menerbitkan surat penetapan KLB dan pembentukan Tim Cepat Tanggap KLB yang memahami tentang penanganan sampel KLB	Pengujian
		Terjadi kecelakaan saat melakukan perjalanan dinas	Memantau kondisi alam daerah yang dituju melalui informasi terupdate dari BMKG, media lainnya	Inspeksi
		Laporan hasil pengawasan sarana, iklan dan penandaan melewati time line	1. Membuat check list SIPT pada kolom LHP. 2. Ketua tim melakukan monitoring dan evaluasi bulanan.	Inspeksi
		CAPA yang diserahkan sarana tidak sesuai antara temuan ketidaksesuaian dengan tindakan perbaikan maupun pencegahannya	Desk pembuatan CAPA kepada penanggung jawab sarana.	Inspeksi
		Iklan UMK lokal yang tidak memenuhi ketentuan	Pengawasan dengan surat tindak lanjut	Inspeksi
		Terjadi kecelakaan kerja pada saat melakukan pengujian	1. Penguji dalam melakukan pengujian menggunakan perlengkapan K3 yang sesuai. 2. Melengkapi gedung laboratorium dengan pemadam kebakaran.	Pengujian
		Terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi/distribusi	1. Meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan. 2. Supervisi dari ketua tim.	Inspeksi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
		Pemalsuan laporan hasil inspeksi sarana produksi/distribusi	1. Supervisi dari ketua tim. 2. Penandatanganan pakta Integritas oleh semua petugas inspeksi. 3. Mensosialisasikan ke pelaku tentang saluran pengaduan gratifikasi/penyalahgunaan wewenang. 4. Memberikan hukuman disiplin kepada petugas yang melakukan pelanggaran integritas.	Inspeksi
		Masih adanya kelemahan dalam mendeteksi obat tidak memenuhi Syarat yang beredar di pasaran	1. Melaksanakan peningkatan kompetensi dan OJT. 2. Melakukan analisis HULS dan Melakukan evaluasi/uji ulang antar personil untuk personil baru.	Inspeksi
		Beberapa aplikasi persuratan sering mengalami gangguan	1. Melakukan back up data periodik.	Tata usaha, Inspeksi Pengujian
			2. Pembuatan surat tindak lanjut secara manual. 3. Membagi risiko ke level yang lebih tinggi.	
		Adanya kekeliruan dalam menetapkan MS/TMS hasil uji pada SIPT	1. Manajer teknis meluangkan waktu untuk cek kembali hasil uji pada SIPT sebelum dikirim. 2. Kepala Balai melakukan revidi kesimpulan Hasil Uji pada SIPT.	Pengujian
		Adanya kekeliruan dalam menetapkan MS/TMS hasil pengujian	Menunjuk manajer teknis yang lebih berpengalaman	Pengujian
		Sampel OBA, SK, Kosmetik dan Pangan yang masuk laboratorium tidak bisa langsung dilakukan pengujian	Optimalisasi instrumen dan pengelompokan parameter uji	Pengujian
		Sarana pelayanan kesehatan tidak aktif melaporkan KTD/ESO walaupun telah diberikan KIE terkait pentingnya melaporkan KTD/ESO	Melakukan pendampingan langsung ke sarana pelayanan kesehatan yang telah diberikan KIE namun belum melaporkan KTD/ESO	Pengujian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
		Pelaku usaha IRT memproduksi PIRT (kerupuk tempe) menggunakan bahan berbahaya (boraks)	Program Desa Pangan Aman dan operasi pengawasan	Inspeksi
		Produk PIRT tidak terjamin keamanannya	Melakukan sampling uji dan pemeriksaan sarana produksi IRT	Inspeksi
2.	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi Pangan Fortifikasi	Sarana produksi pangan fortifikasi yang teregistrasi BPOM yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tidak beroperasi	Koordinasi dengan tim sertifikasi dan Ditwas Produksi Pangan Olahan	Inspeksi
3.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Pemberitaan terkait Kinerja BPOM Aceh di berbagai media cetak/online/ elektronik dan media sosial berkonotasi negatif.	1. Menyebarluaskan informasi strategis BPOM kepada media dan masyarakat serta lebih terbuka. 2. Ragam Media KIE yang disampaikan dalam tols penilaian terlalu banyak.	Infokom
		Petugas menerima (Gratifikasi) hadiah atau penghargaan sebagai ucapan terima kasih/ apresiasi atas pelaksanaan kegiatan KIE di hotel	Kampanye budaya anti gratifikasi kepada penyedia layanan 2. melakukan survey gratifikasi 3. Sosialisasi antigratifikasi melalui video di media sosial	Infokom
		Sekolah yang diintervensi tidak berkomitmen dalam pelaksanaan program PJAS	Membentuk Tim Keamanan Pangan Sekolah	Infokom
		Program Desa Pangan Aman tidak dilanjutkan secara mandiri dan sesuai pedoman	1. Membentuk Tim Keamanan Pangan Desa. 2. Membentuk Kader Keamanan Pangan Desa.	Infokom
		Pada pasar yang telah diintervensi dengan program pasar aman, bahan berbahaya masih juga ditemukan pada pangan yang dijual	Membentuk Tim Fasilitator Pasar Aman	Infokom

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Pelaku usaha kosmetik dan OBA tidak dapat menyelesaikan CAPA audit sertifikasi SPA CPKB/SPA CPOTB	Melakukan koordinasi dan audiensi ke lembaga perbankan terkait bantuan pembiayaan	Sertifikasi
		Pelaku usaha kosmetik dan OBA tidak dapat menyelesaikan CAPA audit sertifikasi SPA CPKB/SPA CPOTB	Melakukan kegiatan Desk CAPA kepada pelaku usaha	Sertifikasi
		Petugas menerima gratifikasi atas layanan yang diberikan	1. Kampanye budaya anti gratifikasi kepada pelaku usaha. 2. Melakukan survei gratifikasi. 3. Sosialisasi anti gratifikasi melalui drama.	Sertifikasi
		Layout sarana produksi belum sesuai standar	Melakukan koordinasi dan audiensi ke lembaga perbankan terkait bantuan pembiayaan	Sertifikasi
		Pelaku usaha pangan tidak memenuhi persyaratan nilai minimal pada form penilaian mandiri	Melakukan kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha pangan	Sertifikasi
		Pelaku usaha kesulitan memenuhi persyaratan permohonan sertifikasi SPA CPKB/CPOTB	Memfasilitasi pelaku usaha untuk berkoordinasi dengan Asosiasi Profesi Tenaga Kefarmasian terkait (IAI/PAFI)	Sertifikasi
		Petugas tidak dapat memproses pengajuan di e-sertifikasi	Melakukan pelaporan melalui aplikasi ITSM	Sertifikasi
		Pemalsuan laporan hasil sertifikasi sarana produksi pangan olahan/OT/Kosmetik	1. Supervisi dari ketua tim. 2. Penandatanganan pakta Integritas oleh semua petugas inspeksi. 3. Mensosialisasikan ke pelaku tentang saluran pengaduan gratifikasi/penyalahgunaan wewenang. 4. Memberikan hukuman disiplin kepada petugas yang melakukan pelanggaran integritas.	Sertifikasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
		UMKM membutuhkan waktu yang lama untuk sertifikasi CPPOB, CPKB dan CPOTB	1. Pendampingan yang lebih insentif terhadap pelaku UMKM produksi Pangan olahan, OT dan Kosmetik. 2. Merekrut Fasilitator UMK untuk pendampingan door to door.	Sertifikasi
5.	Terlaksananya penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Operasi penindakan tidak berhasil menemukan barang bukti di TKP	Penerapan ISO 37001:2016 SMAP	Penindakan
		Petugas menerima suap pada saat operasi penindakan	Penerapan ISO 37001:2016 SMAP	Penindakan
		Tersangka melarikan diri	Peningkatan koordinasi dengan kepolisian untuk upaya tangkap-tahan	Penindakan
		Adanya p-19 yang tidak bisa dipenuhi oleh penyidik	Peningkatan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan	Penindakan
		Ketidaksesuaian hasil intelijen dengan kondisi saat dilakukan penindakan	Verifikasi informasi menjelang penindakan	Penindakan
		Kalah dalam gugatan Pra-Peradilan	Petugas lebih teliti dalam membuat adminitrasi penyidikan	Penindakan
		Jumlah barang bukti tidak sesuai dengan fakta di lapangan	Perencanaan penindakan terkait pembagian tugas personel khususnya dalam perhitungan barang bukti	Penindakan
		Petugas Menjual/ Menggunakan Aset (Barang Bukti)	Dibentuk Tim Petugas Pengelola Barang Bukti	Penindakan
		Identitas petugas intelijen terdeteksi	Perencanaan cover petugas intelijen	Penindakan
		Petugas Melakukan Pemerasan Terhadap Pelaku Kejahatan	Penerapan ISO 37001 : 2016 SMAP	Penindakan
		Jumlah sarana online yang menjual produk Obat dan makanan meningkat	Koordinasi dengan fungsi pemeriksaan terhadap sarana online untuk dapat diberikan pembinaan	Penindakan
		Kegiatan intelijen tidak optimal	Pembentukan jaringan informan	Penindakan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
		Kebocoran informasi akan adanya operasi penindakan sehingga pada saat penindakan sarana tutup atau barang bukti tidak dapat ditemukan	Integritas yang terus dijaga dan dipertahankan; pengaturan strategi yang tepat pada saat operasi penindakan	Penindakan
6.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Penyampaian Laporan Siber dan Profiling Kejahatan tidak tepat waktu	Menyusun Perencanaan timeline pelaporan	Penindakan
		Penyampaian Laporan Cegah Tangkal tidak tepat waktu	Perencanaan timeline pelaporan	Penindakan
7.	Layanan Publik UPT	Pemutusan hubungan kerja dengan petugas pelayanan publik	Menyusun kontrak kerja yang berisi syarat dan ketentuan yang detail dan jelas	Infokom
		Layanan publik yang diberikan kepada konsumen melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan	Melakukan monitoring dan memprioritaskan penyelesaian pengujian pihak ketiga sesuai jangka waktu yang ditetapkan	Infokom
		Petugas pelayanan publik frontliner tidak memberikan informasi kepada masyarakat sesuai standar yang ditetapkan	Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik frontliner melalui pelatihan, magang, dan lain-lain	Infokom
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisasi yang optimal	Rencana kerja berjalan seadanya, sekedar memenuhi persyaratan LKE	Melaksanakan Tindak lanjut rencana kerja melibatkan semua pegawai terkait, dan Rencana Tindak lanjut disusun secara spesifik (what, who, how, when)	Tata Usaha
		Pembangunan ZI yang dilaksanakan tidak diketahui secara luas oleh masyarakat dan stakeholder	Publikasi informasi di media sosial	Tata Usaha
		Inovasi yang dikembangkan belum mengakomodir kebutuhan masyarakat	Melakukan review dan analisis inovasi terhadap kebutuhan masyarakat	Tata Usaha

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
		Rencana aksi perbaikan kinerja per triwulan tidak ditindaklanjuti	Melakukan koordinasi via WA yang lebih intens dengan Ketua Tim Kerja terkait	Tata Usaha
		Masalah/hambatan tidak dapat dianalisis secara komprehensif dalam laporan evaluasi kinerja	Memberikan batas waktu pengumpulan data kepada penanggung jawab data untuk selanjutnya disusun dalam bentuk laporan	Tata Usaha
		Data realisasi kinerja yang ditampilkan berubah-ubah (tidak valid)	Membuat media pengumpulan data yang dapat diakses secara online dan diatur waktu akses editing	Tata Usaha
		Realisasi anggaran tidak sesuai perencanaan RPD Hal III DIPA	Melakukan monev anggaran triwulan	Tata Usaha
		Transaksi keuangan tidak dicatat pada akun yang tepat	1. Melakukan sosialisasi penggunaan akun yang sesuai. 2. Pemeriksaan bertingkat yang dilakukan oleh pengelola keuangan.	Tata Usaha
		Pertanggung jawaban UP dan TUP tidak selesai tepat waktu	Bendahara meminta penyelesaian kuitansi oleh pelaksana kegiatan maksimal 3 hari kalender setelah kegiatan	Tata Usaha
		Realisasi anggaran rendah	Melakukan monev anggaran triwulan	Tata Usaha
		Capaian Output triwulan tidak sesuai target dan tidak tepat waktu	Melakukan monev anggaran per triwulan	Tata Usaha
		Tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran rendah	Mengupayakan capaian output melebihi target	Tata Usaha
		Pembayaran ganda uang makan dan uang harian perjadi di hari yang sama (Double claim)	Melakukan pengecekan kesesuaian kehadiran secara berlapis	Tata Usaha
		Pengembangan kompetensi pegawai belum seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai jenis dan levelnya	1. Menyusun rencana kebutuhan pelatihan untuk masing-masing pegawai. 2. Melakukan pemetaan kebutuhan untuk masing-masing pegawai. 3. Melakukan monev pengembangan kompetensi pegawai.	Tata Usaha

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
		Petugas menerima gratifikasi pada saat penerimaan ASN dan tenaga outsourcing	1. Peningkatan pengawasan internal. 2. Survei anti gratifikasi pada tenaga outsourcing dan ASN.	Tata Usaha
		Pajak yang dipungut terlambat disetorkan (melampaui 7 hari kalender)	Percepatan penyelesaian kuitansi oleh pelaksana kegiatan maksimal 2 hari kalender setelah transaksi dilakukan dan pajak yang dipungut disetor dalam minggu yang sama	Tata Usaha
		Pertanggungjawaban anggaran terkait pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kenyataan	1. Melakukan pengecekan harga. 2. Menandatangani pakta integritas.	Tata Usaha
		Terjadi penghematan anggaran pelaksanaan sertifikasi yang cukup dalam	1. Melakukan penyesuaian target output pengawasan. 2. Melakukan perubahan pengawasan dari onsite ke online (sertifikasi).	Tata Usaha
		Pelaksanaan Evaluasi hanya sebagai formalitas dan tidak memberikan feedback bagi perbaikan manajemen resiko	Pelaksanaan penilaian mengikuti prosedur dalam program kerja dan direviu secara berjenjang	Tata Usaha
		Kurangnya partisipasi dan peran aktif pegawai dalam proses pelaksanaan manajemen resiko	Pelaksanaan Sosialisasi rutin mengenai Manajemen resiko	Tata Usaha
		Pedoman penilaian tingkat maturitas manajemen resiko kurang dipahami	Pelaksanaan Sosialisasi rutin mengenai Manajemen resiko	Tata Usaha

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Arah kebijakan BPOM 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG.
- 2) Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline.
- 3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
- 4) Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- 5) Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- 6) Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- 7) Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Strategi BPOM 2025-2029 dalam mendukung pencapaian kebijakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- 2) Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
- 6) Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
- 7) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Banda Aceh

Untuk mendukung tujuan pembangunan bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Balai Besar POM di Banda Aceh mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM. **Arah Kebijakan** Balai Besar POM di Banda Aceh yang akan dilaksanakan sesuai arah kebijakan BPOM adalah:

- 1) Penguatan pengawasan pre-postmarket Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans,**

perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG

Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Banda Aceh mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk obat dan makanan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta kegiatan yang mendukung program MBG.

2) Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline

Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Banda Aceh meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik online maupun offline.

3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM

Fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri obat dan makanan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha dan mendukung UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4) Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman.

5) Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar.

6) Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Balai Besar POM di Banda Aceh berusaha beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi.

7) Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Dengan memperkuat manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab serta memberikan pelayanan publik berbasis elektronik.

Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi BPOM, Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan analisa program strategis, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1) Meningkatkan pengawasan yang komprehensif (full spectrum) dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Banda Aceh dimulai dari pra-pasar (pre-market) hingga pasca-pasar (post-market) secara komprehensif (full spectrum). Pendekatan ini memastikan seluruh aspek keamanan, mutu, dan manfaat produk diawasi secara menyeluruh. Optimalisasi peran Balai Besar POM di Banda Aceh dilakukan melalui penguatan sistem perizinan, sampling, inspeksi, dan surveillance berbasis risiko. Dalam konteks nasional, pengawasan juga difokuskan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah, dengan memastikan pangan olahan yang digunakan dalam program tersebut memenuhi standar keamanan dan mutu.

2) Memperkuat penyidikan kejahatan dan penindakan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk ilegal dan berbahaya, Balai Besar POM di Banda Aceh memperkuat fungsi penyidikan dan penegakan hukum. Langkah ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), optimalisasi kerja sama dengan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi lain), serta pemanfaatan intelijen pengawasan berbasis data dan teknologi digital. Penguatan ini bertujuan agar setiap pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dapat direspon secara cepat, tegas, dan memberikan efek jera.

3) Peningkatan efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui komunikasi digital dan kemitraan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sediaan farmasi dan pangan olahan aman

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilaksanakan melalui strategi KIE yang lebih interaktif dan digital. Pemanfaatan media sosial, platform daring, serta kolaborasi dengan influencer, komunitas, dan lembaga pendidikan menjadi bagian penting dalam menyebarkan pesan keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan pendekatan kemitraan untuk memperkuat

keterlibatan publik, sehingga masyarakat menjadi lebih sadar, kritis, dan partisipatif dalam memilih produk yang aman dan bermutu.

4) Pemberdayaan dan pendampingan UMKM dalam hal pemenuhan standar keamanan dan mutu, fasilitasi izin edar serta bersinergi dengan lintas sektor

Pemberdayaan UMKM menjadi fokus utama dalam mendukung kemandirian dan daya saing industri lokal. Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan pendampingan intensif kepada pelaku UMKM agar mampu memenuhi standar Cara Produksi yang Baik (CPOB, CPKB, CPPOB) dan standar mutu pangan olahan. Pendampingan mencakup fasilitasi perizinan edar, sertifikasi, dan peningkatan kapasitas manajemen mutu. Sinergi dengan pemerintah daerah, dinas teknis, dan lembaga pembiayaan diperkuat untuk mewujudkan ekosistem UMKM yang berdaya saing dan patuh regulasi.

5) Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor

Tantangan pengawasan obat dan makanan menuntut kolaborasi lintas sektor yang kuat. Oleh karena itu, Balai Besar POM di Banda Aceh memperkuat koordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, asosiasi industri, serta organisasi masyarakat. Kolaborasi ini difokuskan pada harmonisasi kebijakan, pertukaran data dan informasi, serta pelaksanaan pengawasan bersama di lapangan. Dengan koordinasi yang solid, efektivitas pengawasan dan perlindungan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

6) Implementasi Reformasi Birokrasi melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel

Balai Besar POM di Banda Aceh berkomitmen untuk mewujudkan organisasi yang profesional dan berintegritas melalui implementasi Reformasi Birokrasi (RB) secara menyeluruh. Fokus diarahkan pada penyederhanaan proses bisnis, penerapan manajemen kinerja berbasis hasil, penguatan budaya integritas, dan optimalisasi pelayanan publik yang transparan. Dengan tata kelola yang bersih dan akuntabel, diharapkan kinerja organisasi semakin efektif dalam melindungi masyarakat dan membangun kepercayaan publik.

7) Pemenuhan jumlah SDM sesuai beban kerja, peningkatan kualitas layanan publik dengan digitalisasi dan penguatan laboratorium pengujian melalui peningkatan kapasitas, akreditasi, serta modernisasi peralatan laboratorium untuk mendukung analisis sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar internasional

Ketersediaan dan kompetensi SDM menjadi faktor kunci keberhasilan pengawasan. Oleh karena itu, Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan pemenuhan jumlah dan peningkatan kapasitas SDM sesuai kebutuhan dan beban kerja organisasi. Layanan publik diperkuat melalui digitalisasi proses bisnis dan sistem informasi yang terintegrasi. Di sisi lain, penguatan laboratorium difokuskan pada peningkatan kapasitas pengujian, pemeliharaan akreditasi ISO/IEC 17025:2017, serta modernisasi peralatan agar mampu mendukung analisis sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar internasional. Hal ini memastikan hasil pengujian yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya.

Strategi-strategi tersebut dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai Besar POM di Banda Aceh melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam kurun waktu 2025-2029, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun, dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai

satuan kerja di daerah, Balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM. Kegiatan tersebut mencakup penguatan tata kelola internal, peningkatan akuntabilitas kinerja, pengelolaan SDM yang profesional dan berintegritas, penguatan pengendalian intern, serta optimalisasi layanan administrasi dan layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan mudah diakses. Upaya ini juga diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi proses bisnis, serta penyederhanaan prosedur agar pelayanan kepada pemangku kepentingan semakin efektif dan efisien. Seluruh langkah tersebut dilakukan untuk mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik, transparansi, integritas kelembagaan, serta budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan. Dengan demikian, Balai Besar POM di Banda Aceh diharapkan mampu menjadi satker yang adaptif, responsif, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi dinamika pengawasan Obat dan Makanan, sekaligus memastikan setiap proses organisasi berjalan sesuai prinsip *good governance* dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui pengawasan yang semakin kuat dan tata kelola yang semakin baik, peran Balai Besar POM di Banda Aceh dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan perlindungan masyarakat serta mendukung pembangunan kesehatan dan perekonomian daerah maupun nasional.

b. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan pada Balai Besar POM di Banda Aceh. Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas operasional, seperti laboratorium, ruang pelayanan publik, peralatan penunjang pemeriksaan, kendaraan dinas, serta infrastruktur pendukung lainnya berada dalam kondisi optimal dan siap digunakan setiap saat.

Selain itu, kegiatan ini juga mencakup perencanaan kebutuhan barang milik negara, pemutakhiran data BMN melalui sistem informasi yang terintegrasi, pengawasan penggunaan aset agar sesuai ketentuan, serta pelaksanaan inventarisasi dan audit internal secara berkala. Pemeliharaan peralatan laboratorium dan fasilitas gedung dilakukan dengan standar teknis yang ketat untuk menjamin kualitas dan keselamatan kerja, termasuk kalibrasi dan sertifikasi berkala terhadap instrumen pengujian.

Pada aspek sumber daya manusia, pengelolaan belanja pegawai tidak hanya terkait pemenuhan hak keuangan, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan dan motivasi pegawai melalui pengelolaan administrasi kepegawaian yang tertib, akurat, dan sesuai regulasi. Optimalisasi sarana dan prasarana ini menjadi fondasi penting bagi Balai Besar POM di Banda Aceh dalam memastikan bahwa seluruh proses pengawasan dapat berjalan efektif, efisien, dan memenuhi standar mutu, sehingga mendukung terwujudnya pelayanan publik BPOM yang profesional dan berintegritas.

Tabel 3.7 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi
Balai Besar POM di Banda Aceh 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG	Penguatan pengawasan yang komprehensif (full spectrum) dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Unit Teknis dan UPT termasuk Program MBG
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/ deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat penyidikan kejahatan dan penindakan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Pemberdayaan dan pendampingan UMKM dalam hal pemenuhan standar keamanan dan mutu, fasilitasi izin edar serta bersinergi dengan lintas sektor
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui komunikasi digital dan kemitraan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sediaan farmasi dan pangan olahan aman
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pemenuhan jumlah SDM sesuai beban kerja, peningkatan kualitas layanan publik dengan digitalisasi dan penguatan laboratorium pengujian melalui peningkatan kapasitas, akreditasi, serta modernisasi peralatan laboratorium untuk mendukung analisis sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar internasional
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Implementasi Reformasi Birokrasi melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai Besar POM di Banda Aceh juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial. Balai Besar POM di Banda Aceh mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam setiap program dan kegiatan. Penerapan PUG diwujudkan melalui layanan publik yang inklusif dengan melaksanakan KIE yang responsif gender, dengan memperhatikan peran strategis perempuan dalam pengelolaan pangan keluarga sekaligus melibatkan laki-laki agar kesadaran mengenai keamanan obat dan makanan menjadi tanggung jawab bersama.

Demikian juga, program pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang pangan dan obat tradisional dirancang untuk memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha laki-laki maupun perempuan, sehingga mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing produk lokal. Selain itu, melalui penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Balai Besar POM di Banda Aceh memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak menimbulkan bias gender, melainkan mempersempit kesenjangan akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan. Dengan langkah tersebut, Balai Besar POM di Banda Aceh berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan

pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan ISO/IEC 17025:2017 tentang standar internasional yang mengatur tentang kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi, menetapkan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi laboratorium agar dapat diakui secara internasional. ISO ini memberikan manfaat diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas hasil pengujian dan kalibrasi.
2. Meningkatkan kredibilitas laboratorium dan kepercayaan pelanggan.
3. Menghindari kesalahan pengujian sampel dan kalibrasi.

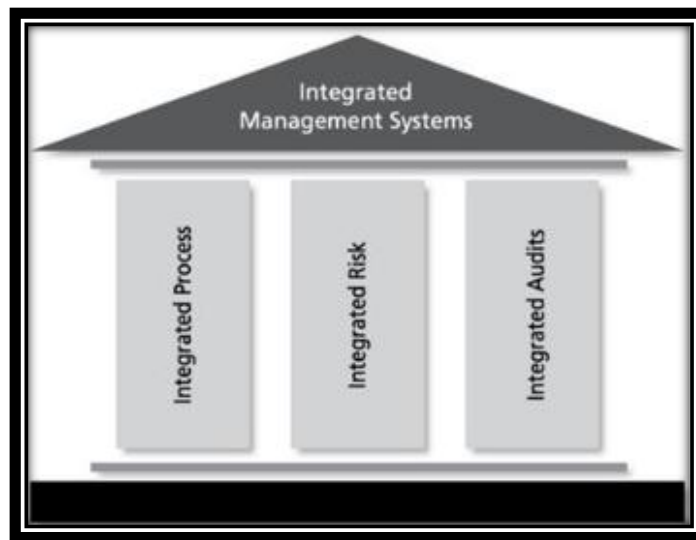
Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 merupakan bentuk tanggung jawab melawan penyuapan. Standar ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada organisasi bahwa sistem anti penyuapan dengan menetapkan langkah-langkah dan kontrol yang berkaitan dengan penyuapan dan dimaksud untuk mencegah, mengurangi dan mendeteksi resiko korupsi.

Manfaat Sistem Manajemen Anti Penyuapan adalah:

- Meningkatkan Sistem Anti Penyuapan:
Memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan dan pengendalian yang diterapkan efektif untuk mencegah dan mengurangi risiko penyuapan.
- Meningkatkan Reputasi Organisasi
Organisasi yang menerapkan standar ini akan lebih dipercaya oleh pelanggan, mitra kerja, dan masyarakat luas sebagai entitas yang berintegritas dan bersih dari praktik korupsi.
- Mengurangi Risiko Hukum
Dengan kepatuhan terhadap ISO 37001:2016, organisasi dapat mengurangi kemungkinan terkena sanksi hukum akibat pelanggaran yang berkaitan dengan penyuapan.
- Meningkatkan Efisiensi Operasional
Implementasi standar ini mendorong organisasi untuk menjalankan proses yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.
- Mendukung Tata Kelola yang Baik

ISO 37001:2016 menjadi bagian dari penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam menjalankan tugas secara bersih, transparan, dan akuntabel.

Penerapan ISO 37001:2016 menunjukkan komitmen organisasi terhadap tata kelola yang baik dan berintegritas. Standar ini menjadi salah satu alat untuk memastikan bahwa organisasi menjalankan tugas dan fungsinya secara transparan, bebas dari penyuapan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya organisasi dalam membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan.



Gambar 2.42 Pilar Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi

Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dibangun dengan tiga pilar yaitu: 1] integrasi proses (Integrated Process); 2] integrasi risiko (Integrated Risk); dan 3] integrasi audit (Integrated Audits). Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi melingkupi seluruh unit organisasi, sebagai kebutuhan primer untuk mencapai tujuan organisasi maka penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi secara bertahap. Dilepaskan dari ketergantungan akan proses sertifikasi/surveilan/resertifikasi dalam pemeliharaan sistem manajemen.

Pemeliharaan sistem manajemen dapat melalui pelaksanaan audit internal dan audit eksternal. Pelaksanaan audit internal bertujuan untuk

menjaga komitmen dan meningkatkan efektivitas penerapan sistem manajemen Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi. Sementara pelaksanaan audit eksternal bertujuan untuk memperoleh sertifikat ISO sebagai bentuk pengakuan terhadap pemenuhan standar dan persyaratan ISO tertentu, dilakukan secara terbatas sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Pembatasan kebutuhan audit eksternal dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas sumber daya dengan tetap membangun konsistensi dan kemandirian seluruh unit organisasi untuk menjalankan ketatalaksanaan dengan mengacu pada standar dan persyaratan Manual Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi pada lingkup BPOM.

Transformasi *Digital Structure* dan *Digital Process*

Transformasi birokrasi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dilakukan melalui digital structure dengan upaya: 1] penyiapan arsitektur SPBE dan interoperabilitas satu portal data; dan 2] penyesuaian sistem kerja melalui implementasi mekanisme tim kerja (squad team) dengan memanfaatkan SPBE. Digital structure merupakan upaya BPOM untuk menggunakan teknologi digital dan kanal online guna meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat (citizen-centric). Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, terbuka, dan efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Penataan proses bisnis untuk mendukung akselerasi transformasi digital pemerintahan merupakan upaya penyediaan arsitektur proses bisnis dan arsitektur layanan dalam kerangka kerja arsitektur SPBE Nasional. Penyediaan arsitektur proses bisnis dilakukan melalui pendokumentasian proses bisnis dalam format *Business Process Modeling Notation* (BPMN). Penyediaan arsitektur layanan dilakukan dengan penyederhanaan proses dan pendokumentasian arsitektur layanan pada proses bisnis tematik bidang perizinan dan akreditasi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh untuk periode 2025–2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang menjadi panduan strategis dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai. Matriks ini memuat sasaran program yang mencerminkan arah pembangunan lembaga, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target-target spesifik yang dirancang untuk memastikan tercapainya perlindungan kesehatan masyarakat secara optimal, khususnya di Provinsi Aceh.

Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen krusial yang merefleksikan hasil akhir yang ingin dicapai Balai Besar POM di Banda Aceh dalam lima tahun mendatang. Matriks ini tidak hanya menjadi alat pemantau capaian, tetapi juga menjadi kompas dalam pengambilan kebijakan dan strategi pengawasan.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Balai Besar POM di Banda Aceh, yaitu memastikan terwujudnya pengawasan obat dan makanan yang efektif, akuntabel, dan terpercaya, melalui penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang antisipatif, serta pengendalian mutu yang ketat di setiap lini kegiatan pengawasan. Dengan semangat kolaboratif dan komitmen yang tinggi, seluruh unit teknis dan struktural diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dan kegiatan. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025–2029 diarahkan untuk mendukung keberhasilan pengawasan yang menyeluruh, mencegah peredaran produk yang tidak memenuhi syarat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan, mutu, dan khasiat produk obat dan makanan, indikator kinerja utama dan target sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh 2025-2029

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.25	91.25	92.25	93.25	94.25
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	91	93
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.30	84.50	85.30	86	87
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	96	97	98	99
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	97.50	98.25	99.00	99.50
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.80	91.20	92.80	94.40	96.00
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	81	82	83	84
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73	75.1	78.7	82.4	85.9
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	15.38	30.77	46.15	61.54	84.62

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81	82	83	84
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	100	100	100
3.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54	87.40	88.27	89.13	90.00
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	10	11	12
		Jumlah desa pangan aman	4	7	7	8	8
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	2	3	3	3
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	19.40	38.81	58.21	79.10	100

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
5.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.5	95	97.5	100	100
6.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
7.	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	4.75	4.80	4.85	4.90
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	90.25	91.25	92.00	93.00	94.00
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	82.78	83.10	83.40	83.70	83.90
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	5	5	5	5	5
		Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	3.2	3.4	3.5	3.6	3.7

Tabel 4.8 berisi sasaran kegiatan, indikator, dan target kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2025-2029. Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh mencakup pengawasan *post-market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan kegiatan *sampling* dan pengujian. Pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor.

Kegiatan yang dilaksanakan terkait tugas fungsi Balai Besar POM di wilayah Aceh, sebagai berikut:

1) Pengujian Sampel Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pengujian Sampel Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan oleh bidang pengujian yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian, pangan, kimia dan mikrobiologi sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk sampel Makanan Bergizi Gratis (MBG). Untuk mendukung tugas tersebut, bidang pengujian memiliki fungsi penyusunan rencana dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengujian pangan, kimia dan mikrobiologi.

Langkah strategis yang dilakukan dalam pengujian sampel Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Balai Besar POM di Banda Aceh, antara lain:

- a. Meningkatkan komitmen pelaksanaan *sampling* dan pengujian berdasarkan pedoman *sampling*.
- b. Meningkatkan kapasitas laboratorium di Balai Besar POM di Banda Aceh.
- c. Melakukan penguatan SDM dengan memberikan pelatihan teknis dan sertifikasi di bidang pengujian.
- d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan *sampling* dan pengujian serta tindak lanjut hasil pengujian.

2) Pemeriksaan Produk dan Sarana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di wilayah Provinsi Aceh dilakukan pengawasannya oleh fungsi pemeriksaan. Fungsi ini

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Penyelenggaraan fungsi pemeriksaan dilakukan melalui kegiatan penyusunan rencana dan program inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Pemeriksaan Produk dan Sarana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan melalui kegiatan strategis berikut ini:

- a. Meningkatkan komitmen kegiatan pemeriksaan produk dan sarana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- b. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).
- c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan.
- d. Aktif melakukan desk CAPA bagi pelaku usaha berkelanjutan secara daring maupun luring.
- e. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan produk dan sarana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

3) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Fungsi Informasi dan Komunikasi yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Langkah strategis untuk mendukung keberhasilan PJAS, desa, pasar aman sebagai berikut:

- a. Komitmen dari kepala sekolah/kepala desa/pengawas pasar dan komunitas sekolah/ desa/ pasar untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di wilayah Provinsi Aceh.

- b. Terdapat Tim Keamanan Pangan Sekolah/desa/pasar yang mempunyai program keamanan pangan mandiri dan mengimplementasi program tersebut di sekolah/desa/pasar.
- c. Koordinasi yang baik antara pihak sekolah/desa/pasar dengan pemangku kepentingan.
- d. Melakukan pengujian terhadap bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam makanan.

4) Penindakan

Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan diawasi oleh fungsi penindakan. Fungsi ini melaksanakan kebijakan operasional terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Perkuatan tugas penindakan dilakukan melalui kegiatan strategis berikut ini:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan, pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran.
- b. Penindakan terhadap produk ilegal yang ada di wilayah kewenangan Balai Besar POM di Banda Aceh.
- c. Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor, baik dengan penegak hukum maupun bersinergi dengan pemerintah daerah.
- d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyidikan serta tindaklanjut penyidikan terhadap pelanggaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- e. Melakukan analisis data serta tindaklanjut hasil penyidikan dalam kerangka pengawasan.

5) Tata Laksana Kerumahtanggaan

Bagian Tata Usaha bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Langkah strategis untuk mendukung kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Banda Aceh, yaitu:

- a. Komitmen dalam penerapan ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017, ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- b. Meningkatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM Balai Besar POM di Banda Aceh.
- c. Mengimplementasikan kebijakan ramah lingkungan dengan menerapkan penggunaan hemat energi seperti listrik.
- d. Meningkatkan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) baik pengelolaan aset tetap ataupun persediaan Balai Besar POM di Banda Aceh.
- e. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan (Renstra dan Penetapan Kinerja), penganggaran (DIPA dan RKAKL), dan evaluasi (Laporan triwulan, LAKIP, LAPTAH, dan Laporan Keuangan) Balai Besar POM di Banda Aceh.
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Beberapa rencana aksi yang dilakukan di Balai Besar POM di Banda Aceh, antara lain:

- 1) Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- 2) Sampling dan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- 3) Penyidikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- 4) Sertifikasi sarana dan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- 5) Pemberdayaan masyarakat melalui KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- 6) Intervensi keamanan pangan di desa, pasar, dan sekolah.
- 7) Layanan dukungan manajemen satker, meliputi:

a. Pembangunan zona integritas Balai Besar POM di Banda Aceh menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pembangunan Zona Integritas di Balai Besar POM di Banda Aceh menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses ini melibatkan transformasi organisasi melalui penerapan reformasi birokrasi yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi.

Dalam hal ini, dilakukan penguatan berbagai aspek internal, seperti manajemen kinerja, pengawasan internal, serta efisiensi proses kerja. Langkah ini dilakukan dengan mengadopsi teknologi informasi untuk mendukung sistem kerja yang modern, seperti penggunaan aplikasi berbasis digital untuk layanan publik, pelaporan, dan pengawasan. Selain itu, penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima juga menjadi prioritas, di mana setiap pegawai didorong untuk mengedepankan integritas, profesionalisme, dan responsivitas dalam melayani masyarakat.

Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM juga melibatkan kolaborasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi penegak hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program yang transparan dan akuntabel, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai lembaga yang kompeten dan bersih. Edukasi masyarakat tentang pentingnya keamanan obat dan makanan juga menjadi bagian integral dari program ini, sehingga masyarakat dapat secara aktif mendukung pengawasan dan pelaporan terkait produk yang tidak aman.

Melalui pembangunan Zona Integritas menuju WBBM, Balai Besar POM di Banda Aceh berkomitmen untuk menjadi model birokrasi yang unggul, memberikan pelayanan yang efisien dan berkualitas, serta menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

b. Penguatan pengelolaan keuangan dan manajemen risiko

Penguatan pengelolaan keuangan dan manajemen risiko merupakan langkah strategis untuk memastikan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada efisiensi penggunaan anggaran. Dalam pengelolaan keuangan, Balai Besar POM di Banda Aceh mengadopsi prinsip-prinsip good governance dengan mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk perencanaan anggaran berbasis kinerja dan pelaporan yang tepat waktu serta sesuai standar.

Proses ini dimulai dengan penyusunan anggaran yang didasarkan pada kebutuhan prioritas, seperti penguatan infrastruktur pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Selanjutnya, pelaksanaan anggaran diawasi secara ketat melalui sistem monitoring berbasis teknologi, yang memungkinkan transparansi penggunaan dana serta deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.

Dalam hal manajemen risiko, dilakukan identifikasi risiko utama yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, seperti ketidakpastian dalam pengawasan produk, ancaman korupsi, atau gangguan operasional akibat keterbatasan sumber daya. Upaya mitigasi risiko dilakukan melalui pengembangan sistem pengendalian internal yang kuat, termasuk pelaksanaan audit internal secara rutin, pembaruan prosedur kerja, dan peningkatan kapasitas pegawai dalam memahami risiko serta cara mengatasinya.

Pendekatan berbasis risiko juga diterapkan dalam pengawasan produk obat dan makanan, di mana pengelolaan risiko diarahkan pada produk dengan tingkat bahaya tinggi atau wilayah yang memerlukan perhatian khusus. Hal ini mendukung penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien, sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat.

Penguatan pengelolaan keuangan dan manajemen risiko ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara optimal, dengan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab dan pengelolaan risiko yang terukur. Hal ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai lembaga yang profesional dan berintegritas.

6) Pemenuhan sarana dan prasarana

Pemenuhan sarana dan prasarana merupakan langkah strategis untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Aceh. Sarana dan prasarana yang memadai menjadi elemen penting dalam memastikan kelancaran operasional, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan infrastruktur pengawasan.

Balai Besar POM di Banda Aceh berupaya untuk menyediakan fasilitas laboratorium yang modern dan berstandar internasional guna mendukung pengujian produk dengan tingkat akurasi yang tinggi. Fasilitas lain seperti ruang kerja yang ergonomis, kendaraan operasional untuk inspeksi lapangan, serta teknologi pendukung seperti sistem informasi manajemen, juga menjadi prioritas dalam pengembangan sarana dan prasarana. Digitalisasi proses pengawasan dan pelayanan publik didukung dengan pengadaan perangkat keras dan lunak yang memungkinkan pelaporan hasil pengujian dan monitoring secara real-time. Hal ini meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan tugas.

Dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, juga diprioritaskan pengelolaan lingkungan kerja yang nyaman dan aman. Kebijakan ini mencakup penyediaan fasilitas pendukung seperti area hijau, fasilitas sanitasi yang baik, serta sistem keamanan yang modern, termasuk pengawasan CCTV di area strategis. Pemenuhan sarana dan prasarana ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan

prioritas, ketersediaan anggaran, serta dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, Balai Besar POM di Banda Aceh dapat menjalankan tugas pengawasan dengan lebih efektif, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung program nasional di bidang keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Banda Aceh periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Banda Aceh
Berdasarkan Kegiatan**

Kegiatan	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	12.083	13.513	15.112	16.899	18.899
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	8.037	8.988	10.051	11.241	12.570
TOTAL	20.120	22.501	25.163	28.140	31.469

**Tabel 4.10 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Banda Aceh
Berdasarkan Sumber Dana**

Kegiatan	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni	18.425	20.619	23.043	25.775	28.815
PNBP	1.696	1.882	2.120	2.365	2.654
TOTAL	20.121	22.501	25.163	28.140	31.469

Dalam kerangka pendanaan dalam RPJMN Buku II 2025-2029 terkait kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan mencakup strategi pembiayaan yang mendukung peningkatan akses, mutu layanan kesehatan, serta perbaikan gizi masyarakat secara komprehensif.

Kerangka pendanaan ini dirancang untuk mendukung target RPJMN, seperti menurunkan angka stunting hingga di bawah 14% dan meningkatkan akses layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah 3T. Pendekatan ini mencakup peran multisektor dan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan untuk mencapai hasil yang optimal dalam kesehatan dan gizi masyarakat.

Kerangka pendanaan Balai Besar POM di Banda Aceh periode 2025-2029 menitikberatkan pada penggunaan anggaran yang efektif untuk mendukung program prioritas seperti pengawasan keamanan pangan, pengujian farmasi, dan penurunan stunting. Pendanaan ini melibatkan sumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui Public Private Partnership (PPP) dan Corporate Social Responsibility (CSR). Public Private Partnership (PPP) mendukung modernisasi laboratorium serta pelaksanaan program berbasis komunitas dan Corporate Social Responsibility (CSR) digunakan untuk kegiatan edukasi gizi, pengawasan keamanan pangan dan promosi kesadaran masyarakat.

BAB V

PENUTUP

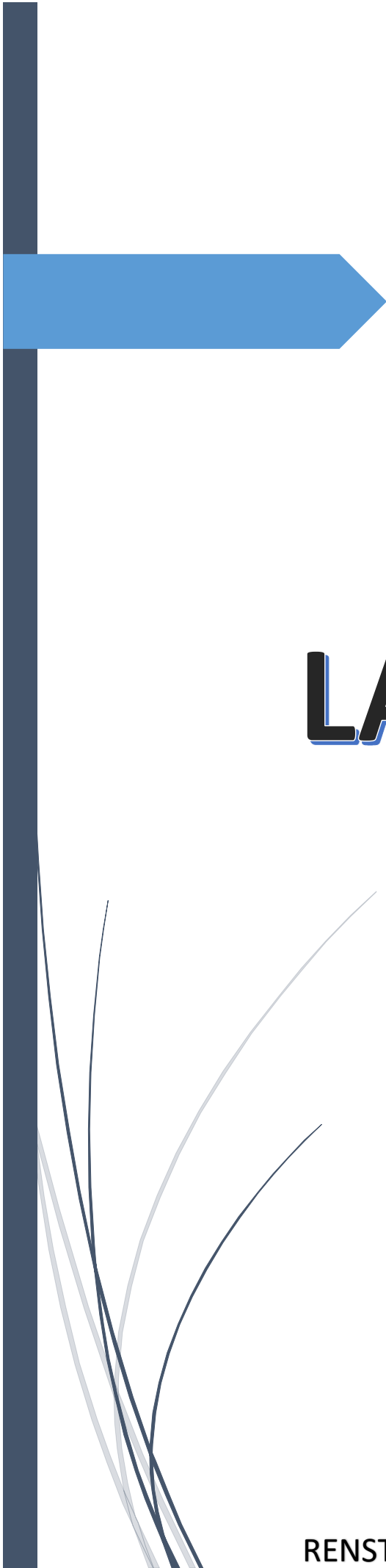
Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh. Pemetaan sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan kerangka logis (*Logical Framework*) yang merupakan suatu metode sistematis yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dengan melakukan cascading/penjenjangan kinerja BPOM mulai dari level sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan hingga level rincian output.

Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing fungsi dan diharapkan setiap fungsi dapat melaksanakannya dengan akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja hingga level individu.

Kepala Balai Besar POM di
Banda Aceh,



Riyanto



LAMPIRAN

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar POM di Banda Aceh							0.0	22,502,011	25,163,999	28,140,900	31,469,969	BBPOM di Banda Aceh	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia							8,037,762	8,988,629	10,051,984	11,241,134	12,570,960		
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Banda Aceh	90.25	91.25	92.25	93.25	94.25					
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		26	27	28	29	30					
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	87	89	91	93					
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100					
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	87	89	92	95					
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		83.30	84.50	85.30	86.00	87.00					
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		95	96	97	98	99					
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95					
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		96.75	97.5	98.25	99.00	99.50					
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95					

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		89.80	91.20	92.80	94.40	96.00						
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		80	81	82	83	84						
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100	100	100	100	100						
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		73	75.1	78.7	82.4	85.9						
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		15.38	30.77	46.15	61.54	84.62						
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	81	82	83	84						
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			45	45	45	45	45						
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			355	355	400	400	420						
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			890	897	945	995	1049						
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			54	66	72	78	87						
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			634	718	765	813	867						
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM			0	204	204	216	216						
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia			1	1	1	1	1						
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			1	1	1	1	1						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			1	1	1	1	1						
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar			0	592	592	592	592						
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi													
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	100	100	100						
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT			3	3	3	3	3						
	Meningkatnya efektivitas KIE													
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		86.54	87.40	88.27	89.13	90.00						
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		10	10	10	11	12						
	3	Jumlah desa pangan aman		4	7	7	8	8						
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1	2	3	3	3						
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			723	1000	1100	1210	1331						
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			24	11	12	13	14						
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			10	10	10	11	12						
	RO 4: Desa Pangan Aman			4	7	7	8	8						
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			1	2	3	3	3						
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu													
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		19.40	38.81	58.21	79.10	100						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			13	13	13	14	14						
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		92.5	95	97.5	100	100						
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan			4	4	4	4	5						
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		90	91	92	93	94						
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			14	14	15	15	15						
	Layanan Publik UPT yang prima													
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT		4.70	4.75	4.80	4.85	4.90						
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			188	207	206	210	211						
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		90.25	91.25	92.00	93.00	94.00						
	2	Nilai AKIP UPT BPOM		82.78	83.10	83.40	83.70	83.90						
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		5	5	5	5	5						
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		3.20	3.40	3.50	3.60	3.70						
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			1	1	1	1	1						
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			1	1	1	1	1						
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi			7	8	8	9	10						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM		Banda Aceh						12,083,861	13,513,382	15,112,015	16,899,766	18,899,009	BBPOM di Banda Aceh
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1						
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1						



BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

 @bpom.aceh

 @bbpom.aceh

 0811 6853 301

 bpomaceh

 bpomaceh

 <https://aceh.pom.go.id>

JL. MOHD DAUD BEUREUH NO.110, BANDAR BARU,
KEC. KUTA ALAM, KOTA BANDA ACEH, ACEH 24415